

### **BAB III**

#### **ANALISIS FRAMING KEBIJAKAN BARAK MILITER GUBERNUR JAWA BARAT DEDI MULYADI DALAM PEMBERITAAN KANTOR BERITA ANTARA**

Bab ini menyajikan analisis temuan penelitian mengenai kebijakan pendidikan karakter berbasis barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam bingkai pemberitaan Kantor Berita ANTARA. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana media nasional tersebut membingkai isu kebijakan pengiriman pelajar bermasalah ke barak militer, baik dari sisi definisi masalah, penyebab yang ditonjolkan, penilaian moral, maupun rekomendasi penyelesaian sebagaimana model framing Robert N. Entman. Analisis ini bertujuan untuk memahami konstruksi realitas media terhadap kebijakan yang memunculkan perdebatan publik terkait pendidikan karakter, disiplin pelajar, serta perlindungan hak anak.

Data penelitian berupa teks berita dikumpulkan dari pemberitaan ANTARA selama periode April hingga Mei 2025, yaitu sejak munculnya wacana awal kebijakan hingga perkembangan implementasi serta respons dari berbagai aktor, seperti pemerintah daerah, kementerian, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat. Rentang waktu tersebut dipilih karena merupakan fase intens pemberitaan ketika kebijakan pendidikan barak militer menjadi isu nasional dan memicu beragam tanggapan, baik yang mendukung maupun yang kritis.

Melalui analisis framing, penelitian ini tidak hanya melihat isi berita secara tekstual, tetapi juga mengkaji bagaimana media menyeleksi fakta, menonjolkan aspek tertentu, serta membentuk perspektif tertentu terhadap kebijakan tersebut. Dengan demikian, analisis diarahkan untuk mengungkap kecenderungan konstruksi makna yang dibangun ANTARA dalam memposisikan

kebijakan pendidikan barak militer, apakah lebih menekankan aspek solusi pendidikan karakter, kontroversi kebijakan, perlindungan anak, atau dinamika politik dan sosial yang menyertainya.

Hasil analisis pada bab ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran media dalam membingkai kebijakan publik, khususnya kebijakan pendidikan karakter berbasis pendekatan semi-militer. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan berkontribusi pada kajian komunikasi media, studi framing kebijakan pendidikan, serta diskursus akademik mengenai relasi antara media, kebijakan publik, dan konstruksi realitas sosial di Indonesia.

### 3.1. Berita yang Pro terhadap Kebijakan Barak Militer

#### 3.1.1. Siswa bermasalah Jabar akan dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025



**Gambar 3.1.** Framing berita 1

#### Define Problem

Pada elemen define problem, artikel berita ANTARA membingkai persoalan utama mengenai meningkatnya jumlah siswa bermasalah di Jawa Barat yang dinilai membutuhkan penanganan khusus melalui pendidikan karakter berbasis disiplin militer. Jurnalis menekankan bahwa fenomena kenakalan pelajar, seperti pergaulan bebas hingga keterlibatan dalam tindakan kriminal, telah mencapai tingkat yang dianggap sulit ditangani oleh mekanisme pendidikan formal biasa. Dengan demikian, persoalan tersebut dikonstruksikan bukan sekadar masalah pendidikan, tetapi sebagai krisis karakter generasi muda yang memerlukan intervensi negara secara lebih tegas.

Hal ini tampak dalam kutipan: “Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan rencana untuk ‘menyekolahkan’ siswa bermasalah di Jabar agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa solusi yang ditawarkan berada di luar jalur pendidikan konvensional, yakni melalui institusi militer. Selain itu, siswa yang menjadi sasaran program secara eksplisit didefinisikan sebagai individu yang sulit dibina dan memiliki kecenderungan perilaku menyimpang. Hal ini terlihat dalam kutipan: “prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.” Definisi tersebut memperluas kategori “siswa bermasalah” hingga mencakup aspek moral dan sosial, bukan hanya pelanggaran akademik atau disiplin sekolah. Framing ini berimplikasi pada pembentukan persepsi publik bahwa masalah utama terletak pada rendahnya karakter dan kedisiplinan pelajar yang dianggap berpotensi mengganggu ketertiban sosial. Dengan demikian, media mengonstruksikan persoalan kenakalan pelajar sebagai ancaman sosial yang memerlukan pendekatan pembinaan yang lebih keras dan sistematis.

### **Diagnose Causes**

Dalam elemen diagnose causes, pemberitaan ANTARA cenderung mengarahkan penyebab masalah pada perilaku individu siswa serta kondisi lingkungan yang dianggap rawan. Penyebab kenakalan pelajar tidak dikaitkan secara eksplisit dengan kelemahan sistem pendidikan formal, ketimpangan sosial ekonomi, atau dinamika keluarga, melainkan pada ketidakmampuan siswa menyesuaikan diri dengan norma sosial dan aturan yang berlaku.

Hal ini tercermin dalam pernyataan gubernur: “Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa wilayah tertentu dipandang memiliki tingkat kerawanan sosial yang lebih tinggi sehingga membutuhkan intervensi khusus. Selain itu, framing berita secara implisit menempatkan siswa sebagai individu yang gagal dibina oleh lingkungan pendidikan maupun keluarga, sehingga memerlukan pembinaan karakter melalui institusi militer. Perspektif ini memperkuat asumsi bahwa perilaku menyimpang pelajar merupakan hasil kelemahan individu atau lingkungan mikro, bukan akibat faktor struktural yang lebih luas seperti kebijakan pendidikan, tekanan ekonomi, perubahan budaya remaja, atau akses terhadap layanan psikologis. Dengan demikian, penyebab masalah dipusatkan pada perilaku menyimpang pelajar, lemahnya pembinaan karakter sebelumnya, serta kondisi wilayah yang rawan. Framing ini secara tidak langsung

mengalihkan perhatian dari kemungkinan persoalan struktural menuju persoalan individual dan lingkungan lokal.

### **Make Moral Judgement**

Pada elemen make moral judgement, artikel berita ini memberikan legitimasi moral terhadap pendekatan disiplin militer sebagai solusi yang dianggap tepat dan positif dalam membentuk karakter pelajar. Program tersebut digambarkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam menyelamatkan generasi muda dari perilaku menyimpang melalui pendidikan karakter yang lebih tegas. Hal ini tampak dari penggunaan istilah bernuansa positif seperti “pendidikan karakter” dan “pembinaan perilaku”, yang memberi kesan bahwa pendekatan militer bukan sekadar tindakan represif, melainkan proses pendidikan moral.

Narasi ini diperkuat melalui kutipan: “rencana ini adalah pendidikan karakter yang akan mulai dijalankan di beberapa wilayah di Jawa Barat.” Selain itu, terdapat pula pernyataan: “TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya.” Kutipan tersebut menampilkan aparat militer sebagai aktor pembina yang berperan dalam membentuk disiplin dan karakter siswa. Melalui framing ini, intervensi negara melalui institusi militer diposisikan sebagai langkah tegas namun bermoral demi kebaikan siswa. Sementara itu, siswa bermasalah secara implisit ditempatkan sebagai pihak yang perlu dikontrol, diarahkan, dan dibentuk ulang perilakunya agar sesuai dengan norma sosial yang diharapkan.

### **Treatment Recommendation**

Pada elemen treatment recommendation, pemberitaan ANTARA menekankan solusi berupa pembinaan siswa bermasalah melalui pendidikan karakter berbasis disiplin militer dalam jangka waktu relatif panjang. Program tersebut diposisikan sebagai solusi utama terhadap persoalan kenakalan pelajar, dengan menekankan aspek kedisiplinan, pelatihan karakter, serta pengawasan intensif oleh aparat militer.

Hal ini terlihat dalam kutipan: “program pembinaan yang akan berlangsung enam bulan per siswa.” Durasi yang cukup panjang tersebut menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan bukan bersifat sementara, melainkan proses pembinaan karakter yang sistematis.

Selain itu, solusi konkret juga disampaikan melalui penyediaan fasilitas pembinaan, sebagaimana dikutip: “tiap siswa akan mengikuti program itu di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI.” Pernyataan ini menegaskan bahwa program tersebut dirancang secara institusional dan terstruktur. Di samping itu, terdapat rekomendasi tambahan berupa peningkatan kualitas guru melalui pelatihan karakter, sebagaimana disebutkan: “guru di Jabar harus memiliki karakteristik yang terstandar serta mengikuti pelatihan karakter.” Dengan demikian, solusi yang dibingkai media tidak hanya berfokus pada pembinaan siswa melalui institusi militer, tetapi juga pada penguatan kapasitas tenaga pendidik. Namun, secara keseluruhan, pendekatan yang ditonjolkan tetap berorientasi pada kontrol disiplin dan pembentukan karakter melalui institusi negara, sementara pendekatan alternatif seperti konseling psikologis, intervensi sosial, atau reformasi sistem pendidikan tidak menjadi fokus utama pemberitaan.

### 3.1.2. Pemerintah kaji program pembinaan siswa ke barak militer



**Gambar 3.2.** Framing berita 2

#### **Define Problem**

Pada elemen define problem, artikel berita ANTARA membingkai persoalan utama sebagai meningkatnya kenakalan dan ketidakpatuhan pelajar yang dianggap memerlukan pendekatan pembinaan khusus di luar mekanisme pendidikan formal. Media mengonstruksikan fenomena ini sebagai masalah sosial yang cukup serius sehingga membutuhkan intervensi institusi negara, bahkan melalui pendekatan disiplin militer. Framing tersebut terlihat dari pernyataan bahwa “pemerintah akan mengkaji gagasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk membina siswa bermasalah melalui program pembinaan di barak militer.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa isu kenakalan pelajar

tidak lagi diposisikan semata sebagai persoalan pendidikan atau keluarga, tetapi telah naik statusnya menjadi isu kebijakan publik yang dipertimbangkan di tingkat nasional.

Selain itu, media mendefinisikan secara eksplisit kategori “siswa bermasalah” dengan mengaitkannya pada berbagai bentuk penyimpangan perilaku remaja. Hal ini tampak dalam kutipan: “Pelajar bermasalah yang dikirim ke markas TNI antara lain pelajar yang diduga terlibat tawuran, merokok, hingga menyalahgunakan narkoba.”

Dengan definisi tersebut, media tidak hanya menyoroti perilaku yang melanggar hukum seperti narkoba atau kekerasan, tetapi juga perilaku yang bersifat normatif seperti merokok, sehingga cakupan masalah menjadi lebih luas. Akibatnya, isu kenakalan pelajar dikonstruksikan sebagai fenomena yang mengancam ketertiban sosial dan memerlukan pendekatan pembinaan yang tegas. Secara framing, media menempatkan peningkatan perilaku menyimpang pelajar sebagai masalah utama yang membutuhkan solusi non-konvensional, yaitu pembinaan karakter berbasis disiplin militer.

### **Diagnose Causes**

Pada elemen diagnose causes, pemberitaan ANTARA cenderung mengarahkan penyebab persoalan pada aspek individual siswa, khususnya terkait lemahnya kedisiplinan, kepatuhan terhadap norma, serta kontrol diri remaja. Penyebab kenakalan pelajar dipahami sebagai akibat dari perilaku menyimpang individu, bukan sebagai produk faktor struktural atau sistemik. Hal ini tercermin dalam pernyataan: “untuk menurunkan sesuatu yang katanya apa tadi? Kenakalan, ketidakpatuhan, dan segala macam seperti itu.” Kutipan tersebut menegaskan bahwa fokus perhatian diarahkan pada perilaku siswa yang dianggap tidak patuh dan bermasalah.



Framing semacam ini secara implisit membentuk pemahaman bahwa sumber masalah berada pada individu pelajar, seperti rendahnya disiplin, kurangnya kepatuhan terhadap aturan, serta lemahnya kontrol diri. Namun, pemberitaan tidak menyinggung kemungkinan faktor lain seperti kondisi keluarga, tekanan sosial ekonomi, kualitas lingkungan pendidikan, dinamika pergaulan remaja, atau kebijakan pendidikan nasional. Absennya perspektif struktural membuat persoalan kenakalan pelajar terlihat seolah-olah semata-mata disebabkan oleh kegagalan individu dalam mengontrol perilaku. Dengan demikian, media memusatkan diagnosis masalah pada pelajar sebagai aktor penyimpangan, bukan pada sistem sosial yang lebih luas.

### **Make Moral Judgement**

Dalam elemen make moral judgement, artikel berita ini memberikan legitimasi moral terhadap program pembinaan militer sebagai alternatif solusi, selama pelaksanaannya tidak melanggar aturan hukum dan hak anak. Pemerintah pusat digambarkan bersikap terbuka terhadap gagasan tersebut, tetapi tetap berhati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Hal ini terlihat dalam pernyataan Hasan Nasbi: “selama program tersebut tidak melanggar aturan dan hak-hak anak, serta mendapat persetujuan orang tua, maka pembinaan semacam itu dapat dipertimbangkan.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa program pembinaan militer diposisikan sebagai sesuatu yang potensial secara moral, tetapi tetap membutuhkan pengawasan normatif.

Selain itu, media juga membangun opini publik agar tidak langsung menolak kebijakan tersebut, sebagaimana tercermin dalam kutipan: “masyarakat tidak langsung bersikap antipati terhadap inisiatif baru ini.” Ajakan tersebut berfungsi sebagai framing moral yang menempatkan program pembinaan militer sebagai inovasi kebijakan yang

layak diuji, bukan sesuatu yang kontroversial. Legitimasi moral semakin diperkuat melalui klaim keberhasilan awal program, yaitu “Program ini memberikan dampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar.” Melalui konstruksi tersebut, pendekatan militer dipresentasikan sebagai metode yang berpotensi efektif, sah secara hukum, dan dapat diterima secara moral. Sebaliknya, siswa bermasalah tetap dikonstruksikan sebagai kelompok yang perlu diarahkan ulang perilakunya melalui disiplin yang lebih ketat.

### **Treatment Recommendation**

Pada elemen treatment recommendation, pemberitaan ANTARA menekankan solusi berupa evaluasi kebijakan sekaligus kemungkinan perluasan program pembinaan militer ke tingkat nasional. Media tidak hanya menyoroti implementasi program di Jawa Barat, tetapi juga membuka peluang replikasi kebijakan tersebut setelah melalui proses kajian pemerintah pusat. Hal ini tampak dalam pernyataan: “Pemerintah akan periksa, akan kaji ini.” serta “kita kaji juga bersama-sama apakah ini bisa efektif atau tidak.” Kedua kutipan tersebut menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan berorientasi pada evaluasi efektivitas program sebelum diadopsi lebih luas.

Selain itu, terdapat rekomendasi perluasan sasaran program hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sebagaimana dinyatakan: “program akan diperluas hingga ke jenjang SMA, termasuk kalangan remaja yang telah teridentifikasi melakukan pelanggaran kedisiplinan.” Dengan framing ini, solusi yang dibangun media meliputi evaluasi kebijakan secara nasional, legitimasi berbasis efektivitas disiplin, serta kemungkinan ekspansi program pembinaan militer. Pendekatan tersebut tetap berfokus pada kontrol perilaku melalui institusi militer sebagai sarana pembentukan karakter, sementara alternatif solusi lain seperti penguatan sistem pendidikan, pendekatan psikologis, konseling, atau intervensi

sosial tidak menjadi fokus utama pemberitaan. Hal ini menunjukkan bahwa media mengarahkan pembaca untuk melihat pembinaan militer sebagai opsi kebijakan yang realistis dan layak dipertimbangkan dalam mengatasi kenakalan pelajar.

### 3.1.3. Mendukbangga respons soal anak nakal dikirim ke barak militer



**Gambar 3.3** Frame berita 3

#### **Define Problem.**

Pada elemen define problem, artikel berita ANTARA membingkai persoalan kenakalan anak tidak lagi semata sebagai perilaku menyimpang yang membutuhkan pendekatan disipliner seperti pengiriman ke barak militer, melainkan sebagai fenomena sosial yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam terhadap akar penyebabnya. Media menggeser fokus dari solusi represif menuju kebutuhan analisis sebab-sebab kenakalan anak sebelum menentukan bentuk intervensi yang tepat. Framing ini

menunjukkan perubahan perspektif dari pendekatan kontrol perilaku menuju pendekatan preventif dan analitis dalam memahami masalah anak.

Hal tersebut tercermin dalam pernyataan Mendukbangga: “Setiap peristiwa ada sebab. Nakal itu kan pasti ada sebab, yang kita urai adalah sebabnya.” Pernyataan ini menegaskan bahwa kenakalan anak dipahami sebagai gejala yang memiliki latar belakang tertentu, bukan semata-mata kesalahan individu yang harus segera dihukum atau didisiplinkan. Dengan demikian, isu utama yang dibingkai media adalah perlunya memahami faktor penyebab kenakalan anak sebagai dasar penyusunan kebijakan pembinaan yang lebih efektif dan berkelanjutan, bukan sekadar mengandalkan pendekatan disipliner berbasis militer.

### **Diagnose Causes**

Pada elemen diagnose causes, jurnalis ANTARA menekankan bahwa kenakalan anak merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan dan tidak terjadi secara tiba-tiba. Penyebab masalah tidak dijelaskan secara rinci dalam berita, tetapi ditekankan pentingnya proses identifikasi penyebab sebelum menentukan solusi kebijakan. Hal ini terlihat dari penegasan Mendukbangga: “yang perlu diurai adalah kenapa, kalau sudah (ketemu) kenapa, baru kita jawab.” Kutipan tersebut mengindikasikan bahwa penyebab kenakalan anak harus dianalisis terlebih dahulu agar intervensi yang dilakukan tidak bersifat reaktif semata.

Framing ini secara implisit membuka kemungkinan bahwa faktor penyebab kenakalan anak dapat berasal dari lingkungan keluarga, pola asuh, tekanan sosial, kondisi pendidikan, maupun faktor psikologis anak. Dengan tidak menempatkan siswa sebagai

satu-satunya penyebab masalah, berita ini cenderung mengarahkan pembaca untuk melihat kenakalan anak sebagai fenomena sosial yang kompleks. Pendekatan tersebut berbeda dengan framing sebelumnya yang lebih menekankan kesalahan individu pelajar. Dalam konteks ini, penyebab masalah diposisikan sebagai hasil interaksi berbagai faktor sosial, bukan semata kegagalan individu dalam menaati aturan.

### **Make Moral Judgement**

Pada elemen make moral judgement, artikel berita ini memberikan penilaian normatif bahwa pendekatan tunggal berupa pembinaan militer tidak cukup memadai untuk menyelesaikan persoalan kenakalan anak. Jurnalis menampilkan Mendukbangga sebagai figur otoritatif yang menekankan pentingnya pencegahan serta perubahan perilaku berbasis pemahaman sebab-akibat. Hal ini terlihat dalam pernyataan: “tugas saya itu kan mencegah dan mengubah perilaku.” Pernyataan tersebut menegaskan bahwa orientasi kebijakan seharusnya tidak hanya pada penindakan, tetapi pada upaya preventif dan pembinaan yang berkelanjutan.

Selain itu, aspek moral juga diperkuat melalui penekanan pada pentingnya kerja sama lintas lembaga dalam menangani persoalan anak. Hal ini terlihat dalam kutipan: “persoalan mendidik anak ini tidak bisa hanya dilakukan oleh salah satu lembaga atau instansi saja, tetapi kerja bersama.” Melalui framing ini, pendekatan kolaboratif diposisikan sebagai pilihan yang lebih bijak dan bertanggung jawab secara moral dibanding pendekatan represif yang berdiri sendiri. Dengan demikian, solusi yang hanya mengandalkan disiplin militer secara implisit dinilai kurang komprehensif jika tidak disertai pemahaman menyeluruh terhadap faktor penyebab kenakalan anak.

## **Treatment Recommendation**

Pada elemen treatment recommendation, pemberitaan ANTARA mengarahkan solusi pada upaya pencegahan dan penanganan kenakalan anak melalui penguraian sebab-sebab sosial serta kerja sama lintas institusi. Media tidak menolak sepenuhnya pendekatan disipliner seperti pembinaan militer, tetapi menempatkannya sebagai salah satu alternatif yang tidak boleh berdiri sendiri tanpa dukungan pendekatan lain. Hal ini tercermin dalam pernyataan: “yang kita urai adalah sebabnya.” Pernyataan tersebut menegaskan bahwa solusi kebijakan harus diawali dengan identifikasi penyebab masalah secara komprehensif.

Selain itu, pendekatan kolaboratif juga ditekankan melalui pernyataan: “tidak bisa dikerjakan oleh satu kementerian.” Kutipan ini menunjukkan bahwa penanganan kenakalan anak memerlukan sinergi berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, pemerintah, serta institusi sosial lainnya. Dengan demikian, rekomendasi penyelesaian masalah mencakup identifikasi akar penyebab kenakalan anak, pendekatan preventif, kerja sama lintas lembaga, serta perubahan perilaku berbasis pemahaman sosial dan psikologis. Dalam framing ini, pembinaan militer hanya diposisikan sebagai salah satu opsi kebijakan, sementara pendekatan holistik dan preventif dianggap lebih relevan untuk menjamin keberhasilan pembinaan anak dalam jangka panjang.

### 3.1.4. Dedi Mulyadi akan diskusi dengan Mendikdasmen soal pendidikan di barak



**Gambar 3.4** Framing berita 4

#### **Define Problem**

Pada elemen define problem, artikel berita ANTARA membingkai persoalan utama sebagai meningkatnya kenakalan dan menurunnya kedisiplinan remaja di Jawa Barat yang dinilai telah melampaui kapasitas keluarga dan sekolah dalam melakukan pembinaan. Permasalahan tersebut tidak hanya dipahami sebagai kenakalan individual, tetapi dikonstruksikan sebagai krisis perilaku generasi muda yang memerlukan intervensi khusus melalui pendidikan karakter berbasis disiplin militer. Media menampilkan narasi bahwa mekanisme sosial konvensional seperti keluarga dan lembaga pendidikan formal dianggap tidak lagi efektif menghadapi perubahan pola perilaku remaja yang semakin kompleks.

Hal ini terlihat dari pernyataan Dedi Mulyadi bahwa “orang tua dan pihak sekolah tidak dapat menyelesaikan permasalahan remaja di Jawa Barat.”

Selain itu, masalah perilaku remaja juga dirinci melalui kebiasaan negatif yang dikaitkan dengan perkembangan teknologi digital dan dinamika sosial kontemporer, seperti dalam pernyataan bahwa “remaja usia sekolah di Jawa Barat disebut kerap tidur dini hari karena bermain game daring sehingga menyebabkan mereka tidak berangkat ke sekolah.” Narasi lain menambahkan bahwa “remaja-remaja di Jawa Barat terorganisasi secara sistematis melalui kekuatan media sosial untuk melakukan pertengkarannya.” Dengan demikian, isu utama yang dibingkai media adalah kemerosotan disiplin dan moral remaja yang dianggap tidak lagi dapat ditangani secara optimal oleh institusi keluarga dan sekolah, sehingga memerlukan pendekatan pembinaan alternatif.

### **Diagnose Causes**

Pada elemen diagnose causes, jurnalis ANTARA mengarahkan penyebab permasalahan pada kombinasi faktor gaya hidup remaja, pengaruh teknologi digital, lingkungan sosial yang kurang kondusif, serta lemahnya kontrol sosial dari keluarga dan sekolah. Remaja diposisikan sebagai pihak yang sekaligus terpengaruh oleh lingkungan sosial negatif dan menjadi aktor dalam perilaku menyimpang. Penyebab kenakalan tidak semata ditempatkan pada kesalahan individu, melainkan pada ekosistem sosial yang dinilai mengalami disfungsi.

Hal ini tercermin dalam sejumlah kutipan seperti “pola hidup yang tidak disiplin” dan “konsumsi media sosial yang berlebihan,” yang menunjukkan bahwa gaya hidup digital dipandang sebagai faktor penting dalam perubahan perilaku remaja. Selain itu,



pernyataan bahwa “obat-obatan yang tidak layak dikonsumsi serta minuman keras juga beredar dan bisa diakses dengan mudah” menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap faktor lingkungan yang memfasilitasi perilaku menyimpang. Narasi tentang lingkungan keluarga dan sekolah juga memperkuat framing tersebut, seperti dalam pernyataan “selama ini mereka di rumahnya tidak mendapat lingkungan yang baik, di lingkungan sekolahnya tidak mendapat lingkungan yang baik.” Dengan demikian, penyebab kenakalan dikonstruksikan sebagai hasil interaksi gaya hidup digital, lingkungan sosial negatif, serta lemahnya kontrol keluarga dan sekolah, sehingga masalah dipahami sebagai persoalan ekosistem sosial yang kompleks.

### **Make Moral Judgement**

Pada elemen make moral judgement, artikel berita ini memberikan legitimasi moral yang kuat terhadap pendidikan berbasis disiplin militer sebagai solusi yang dianggap rasional dan bermoral dalam menghadapi krisis perilaku remaja. Jurnalis memberikan ruang cukup luas bagi pernyataan Dedi Mulyadi yang menegaskan bahwa pendekatan tersebut merupakan bentuk penyelamatan generasi muda. Hal ini terlihat dalam pernyataan bahwa “pendidikan karakter bagi siswa SMP dan SMA sederajat yang bermasalah di barak militer merupakan solusi terbaik.” Pernyataan tersebut membangun legitimasi moral bahwa kebijakan ini bukan sekadar tindakan disipliner, tetapi upaya pendidikan karakter.

Selain itu, program juga dibingkai sebagai kebijakan yang tidak melanggar hak anak, bahkan dianggap memberikan lingkungan yang lebih kondusif bagi pembinaan karakter, sebagaimana terlihat dalam pernyataan bahwa “programnya yang sudah mulai dijalankan itu tidak melanggar hak-hak anak” serta “di barak itu mereka mendapat lingkungan yang baik.” Legitimasi moral semakin diperkuat dengan penempatan institusi

militer sebagai lembaga yang kompeten dan berpengalaman, seperti dalam pernyataan “TNI dipilih... karena telah berpengalaman dalam melakukan pendidikan.” Melalui framing ini, pendekatan disipliner militer dikonstruksikan sebagai tindakan penyelamatan, pendidikan karakter yang sah, serta solusi etis terhadap krisis moral remaja.

### **Treatment Recommendation**

Pada elemen treatment recommendation, pemberitaan ANTARA mengarahkan solusi pada penguatan dan perluasan program pendidikan barak militer melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program ini diposisikan tidak hanya sebagai kebijakan lokal Jawa Barat, tetapi sebagai model pembinaan karakter yang berpotensi diintegrasikan ke dalam kebijakan pendidikan yang lebih luas. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa pemerintah daerah “akan berdiskusi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai pendidikan karakter.”

Selain itu, program juga diposisikan sebagai solusi jangka pendek yang praktis untuk merespons situasi darurat kenakalan remaja, sebagaimana dinyatakan bahwa “harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa.” Pendekatan tersebut diperkuat dengan adanya pendampingan profesional, seperti dokter, psikolog, dan guru agama, sebagaimana disebutkan dalam kutipan “didampingi oleh dokter, psikolog, dan guru mengaji.” Dengan demikian, rekomendasi pemecahan masalah mencakup kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, institusionalisasi pembinaan militer dalam pendidikan karakter, pendekatan disiplin yang terkontrol, serta penguatan legitimasi kebijakan melalui dukungan profesional. Framing ini menempatkan pembinaan militer sebagai solusi strategis dalam menangani krisis perilaku remaja.

### 3.1.5. Pigai: Pendidikan siswa bermasalah di barak tak salah standar HAM



**Gambar 3.5** Framing berita 5

#### **Define Problem**

Dalam berita ini, ANTARA membingkai isu utama bukan sebagai kontroversi kebijakan pendidikan atau persoalan kenakalan remaja, melainkan sebagai persoalan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia (HAM). Fokus pemberitaan diarahkan pada upaya klarifikasi bahwa program pendidikan siswa bermasalah di barak militer tidak melanggar prinsip HAM, sehingga framing yang dibangun sejak awal cenderung defensif dan legitimatif terhadap kebijakan tersebut. Hal ini terlihat jelas bahkan pada judul berita yang berbunyi, “Pendidikan siswa bermasalah di barak tak salah standar HAM”, yang

secara langsung mengarahkan pembaca pada kesimpulan bahwa kebijakan tersebut aman dari perspektif HAM.

Pernyataan pejabat terkait semakin memperkuat framing ini, misalnya ketika Pigai menegaskan bahwa “program ... tidak menyalahi standar HAM karena bukan merupakan bentuk hukuman fisik.” Dengan demikian, problem utama yang dikonstruksikan media bukan lagi pada perilaku remaja atau efektivitas metode pendidikan, melainkan pada legalitas moral dan kepatuhan HAM dari praktik pendidikan berbasis militer. Media tampak membingkai isu dugaan pelanggaran HAM sebagai kekhawatiran publik yang perlu diluruskan melalui otoritas pejabat negara.

### **Diagnose Causes**

Pada elemen diagnose causes, artikel ini mengaitkan potensi masalah HAM dengan kekhawatiran publik mengenai kemungkinan adanya kekerasan fisik dalam praktik pendidikan disipliner di barak militer. Dalam pemberitaan tersebut, Pigai menjelaskan bahwa pelanggaran HAM dalam konteks pendidikan anak biasanya merujuk pada praktik corporal punishment atau hukuman fisik, yang ia definisikan sebagai tindakan seperti “memukul, menampar, atau menggunakan benda keras.” Penjelasan ini secara tidak langsung membatasi definisi pelanggaran HAM hanya pada aspek kekerasan fisik, sehingga aspek lain seperti tekanan psikologis, stigma sosial, atau dampak simbolik militerisasi pendidikan tidak menjadi fokus pembahasan. Selanjutnya,

Pigai menegaskan bahwa program yang dijalankan oleh Dedi Mulyadi “tidak termasuk ke dalam kategori hukuman fisik,” sehingga secara logis disimpulkan bahwa program tersebut tidak melanggar HAM. Dengan framing seperti ini, penyebab persoalan

diposisikan bukan pada keberadaan pendidikan di barak militer itu sendiri, tetapi pada kemungkinan terjadinya kekerasan fisik dalam proses pendidikan. Militerisasi pendidikan dikonstruksikan sebagai sesuatu yang netral selama tidak disertai praktik kekerasan fisik, sehingga potensi kritik terhadap pendekatan militer menjadi relatif tereduksi.

### **Make Moral Judgement**

Penilaian moral dalam artikel ini cenderung mengarah pada legitimasi kebijakan pendidikan berbasis barak militer sebagai tindakan yang sah secara etis dan bahkan bernilai positif bagi pembentukan karakter anak. Pigai menyatakan bahwa program tersebut merupakan “bagian dari pembentukan karakter, mental, dan tanggung jawab anak,” serta menegaskan bahwa kebijakan tersebut “sesuai dengan prinsip dan standar HAM.” Pernyataan ini membingkai pendidikan militer bukan sebagai bentuk hukuman atau represi, melainkan sebagai upaya edukatif yang bertujuan membangun kedisiplinan dan tanggung jawab generasi muda. Di sisi lain, hukuman fisik secara tegas diposisikan sebagai praktik yang tidak baik karena berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kondisi fisik maupun mental anak. Pemisahan tegas antara pendidikan karakter berbasis disiplin dan hukuman fisik ini memperkuat legitimasi moral program barak militer. Media juga menguatkan narasi positif tersebut dengan menyertakan pernyataan Dedi Mulyadi bahwa program tersebut “memberikan dampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar.” Dengan demikian, framing moral yang dibangun bersifat berlapis: program dianggap legal dari perspektif HAM sekaligus dinilai efektif secara praktis dalam membentuk perilaku disiplin remaja.

## **Treatment Recommendation**

Dalam elemen treatment recommendation, berita ini tidak mengarah pada penghentian kebijakan pendidikan di barak militer, melainkan pada penguatan dan kelanjutan program tersebut dengan penekanan bahwa praktiknya harus bebas dari kekerasan fisik. Solusi yang dikonstruksikan adalah pembinaan karakter melalui pendekatan disiplin militer yang berorientasi pada pembentukan mental, nilai tanggung jawab, serta kedisiplinan sosial, bukan pada pemberian hukuman fisik.

Hal ini terlihat dari penegasan bahwa program tersebut tidak melanggar HAM selama tidak mengandung corporal punishment. Bahkan secara implisit, program tersebut didorong untuk diperluas cakupannya, sebagaimana disebutkan bahwa “program akan diperluas hingga ke jenjang SLTA.” Framing ini menunjukkan bahwa media memposisikan pendidikan berbasis barak militer sebagai solusi yang dapat diterima secara moral, legal, dan praktis, selama dijalankan sesuai prinsip perlindungan anak. Dengan demikian, rekomendasi penyelesaian masalah tidak berupa perubahan pendekatan secara fundamental, tetapi optimalisasi program disiplin militer dengan pengawasan agar tetap sejalan dengan standar HAM.

### 3.1.6. Disdikpora Cianjur : Pembinaan di barak dapat menekan siswa bermasalah



**Gambar 3.6** Framing berita 6

#### **Define Problem**

Dalam berita ini, ANTARA membingkai persoalan utama sebagai meningkatnya kenakalan pelajar di Kabupaten Cianjur yang dianggap memerlukan penanganan khusus melalui pendekatan disipliner militer. Masalah dikonstruksikan bukan sekadar pelanggaran perilaku biasa, tetapi fenomena sosial yang cukup serius karena melibatkan tindakan kekerasan, tawuran, hingga berbagai bentuk kenakalan remaja lain yang dinilai mengganggu ketertiban sosial. Hal ini terlihat dari pernyataan Kepala Disdikpora Cianjur bahwa “program pembinaan di barak militer dapat menekan kasus kenakalan siswa atau siswa bermasalah yang marak terjadi di Cianjur, terutama tawuran dan kenakalan lainnya.”

Selain itu, kenakalan pelajar juga digambarkan sebagai ancaman berulang yang perlu dikendalikan secara tegas, sebagaimana disebutkan bahwa pembinaan dilakukan agar siswa “tidak lagi mengulangi kesalahan.” Dengan framing tersebut, media mendefinisikan masalah sebagai krisis kedisiplinan pelajar yang membutuhkan intervensi kuat di luar mekanisme pendidikan formal biasa, sehingga legitimasi solusi berbasis militer menjadi tampak rasional.

### **Diagnose Cause**

Pada elemen diagnose causes, ANTARA mengarahkan penyebab masalah pada perilaku menyimpang pelajar yang dikaitkan dengan keterlibatan dalam kekerasan jalanan, tawuran, konsumsi alkohol, hingga aktivitas kelompok bermotor yang dianggap berisiko sosial. Penyebab persoalan diposisikan terutama pada tindakan individu siswa, bukan pada faktor struktural seperti kondisi keluarga, ekonomi, atau sistem pendidikan. Hal ini tampak dalam pernyataan bahwa siswa yang akan dibina meliputi mereka yang “terlibat tawuran... aksi kekerasan jalanan atau gerombolan bermotor.” Bahkan pemerintah daerah juga menyebut adanya perilaku menyimpang lain seperti “mabuk-mabuk-kan, hingga penyimpangan seksual.” Framing ini menempatkan kenakalan pelajar sebagai persoalan moral dan kedisiplinan individu yang perlu dikoreksi melalui kontrol eksternal. Dengan demikian, penyebab masalah dikonstruksikan lebih pada kegagalan individu dalam menaati norma sosial daripada kegagalan sistem sosial atau pendidikan yang lebih luas.

### **Make Moral Judgement**

Elemen make moral judgement dalam berita ini menampilkan legitimasi moral yang cukup kuat terhadap program pembinaan militer. Pendekatan barak militer



diposisikan sebagai langkah tegas namun positif demi memperbaiki karakter generasi muda. Hal ini tampak dalam pernyataan bahwa pembinaan tersebut dapat menjadi “senjata pamungkas untuk menekan kenakalan pelajar.” Istilah “senjata pamungkas” memberi konotasi solusi terakhir yang efektif dan diperlukan dalam situasi krisis. Selain itu, program ini juga dibingkai sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk “memperbaiki kualitas generasi muda Cianjur.” Dengan framing ini, pendekatan militer tidak dipersepsikan sebagai

tindakan represif, melainkan sebagai upaya pendidikan karakter dan pembentukan budi pekerti. Militer diposisikan sebagai institusi yang mampu memberikan disiplin, tanggung jawab, dan kontrol moral yang dianggap kurang berhasil diberikan oleh keluarga maupun sekolah.

### **Treatment Recommendation**

Dalam aspek treatment recommendation, ANTARA membingkai solusi utama berupa implementasi program pembinaan siswa bermasalah di barak militer melalui kerja sama pemerintah daerah dengan institusi militer dan aparat keamanan lainnya. Program ini diproyeksikan sebagai intervensi praktis untuk menekan kenakalan pelajar secara cepat dan terukur. Hal ini terlihat dari rencana konkret bahwa “siswa bermasalah akan langsung dijemput dan diantar ke barak militer guna mendapat pembinaan budi pekerti dan kedisiplinan.”

Selain itu, solusi juga diperkuat dengan kolaborasi lintas institusi, sebagaimana disebutkan adanya MoU dengan “Kodim 0608 Cianjur dan Yonif Raider 300/Brajawijaya... serta melibatkan kepolisian dan BNN.” Durasi pembinaan yang relatif

singkat, mulai “satu sampai dua minggu” hingga maksimal dua bulan, menunjukkan bahwa solusi difokuskan pada pendekatan disipliner intensif sebagai shock therapy perilaku. Dengan framing tersebut, media menampilkan pembinaan militer sebagai solusi realistis, terstruktur, dan didukung institusi negara, meskipun tidak banyak membahas alternatif pendekatan pedagogis, psikologis, atau sosial lainnya.

### 3.1.7. Wamendagri nilai anak bermasalah masuk ke barak perlu libatkan pakar



**Gambar 3.7** Framing berita 7

#### Define Problem

Dalam berita ini, ANTARA membingkai isu utama bukan sebagai penolakan total terhadap kebijakan pembinaan siswa di barak militer, melainkan sebagai persoalan kehati-hatian dalam perumusan kebijakan pendidikan anak. Masalah dikonstruksikan sebagai

kebutuhan memastikan bahwa program pembinaan berbasis militer tidak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa pertimbangan ilmiah dan pedagogis yang memadai.

Hal ini terlihat dari pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang menekankan pentingnya perencanaan matang: “disiapkan, dikonseptkan dengan hati-hati. Melibatkan juga tentunya para pakar, pemerhati keluarga, ahli ilmu keluarga, psikolog, dan tentu harus diajak bicara juga keluarganya.” Dengan framing ini, media tidak langsung memposisikan program barak militer sebagai masalah utama, melainkan cara implementasinya yang perlu dikaji lebih komprehensif. Fokus problem bergeser dari kenakalan anak maupun legitimasi militerisasi pendidikan menuju kualitas desain kebijakan publik yang menyangkut perkembangan psikologis anak.

### **Diagnose Causes**

Pada elemen diagnose causes, penyebab potensi masalah diarahkan pada kurangnya kajian mendalam serta kemungkinan dominasi pendekatan disipliner tanpa memperhatikan aspek psikologis dan sosial anak. Bima Arya menegaskan bahwa pendidikan anak tidak hanya soal disiplin fisik, tetapi juga menyangkut perkembangan mental dan kepribadian. Hal ini terlihat dalam pernyataan: “yang namanya mendidik itu bukan hanya sekadar melatih kedisiplinan, tetapi ada unsur psikologis dan kepribadian yang juga harus diperhatikan.” Framing ini menunjukkan bahwa masalah bukan semata kenakalan pelajar, melainkan pendekatan kebijakan yang berpotensi terlalu sempit jika hanya menitikberatkan pada pelatihan disiplin ala militer. Selain itu, kurangnya pelibatan keluarga dan pakar juga diposisikan sebagai faktor yang dapat melemahkan efektivitas program, sebagaimana disebutkan perlunya “melibatkan pakar... psikolog... dan tentu harus diajak bicara juga keluarganya.” Dengan demikian, penyebab masalah

dikonstruksikan pada aspek desain kebijakan yang belum sepenuhnya integratif, bukan pada perilaku siswa semata.

### **Make Moral Judgement**

Elemen make moral judgement dalam berita ini bersifat moderat dan hati-hati. ANTARA menampilkan Bima Arya sebagai figur otoritatif yang menekankan bahwa pendidikan anak harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan, psikologi, dan relasi sosial. Pendekatan militer tidak secara eksplisit ditolak, tetapi dinilai perlu dilengkapi dengan pendekatan kekeluargaan dan konseling. Hal ini terlihat dalam pernyataan bahwa pola pendidikan harus “lebih menekankan pada pendekatan kekeluargaan, membangun interaksi antara peserta, pemerintah daerah... dan pihak yang bertugas menangani anak-anak tersebut.” Framing moral di sini mengarah pada nilai bahwa pendidikan ideal harus humanis, komprehensif, dan berbasis relasi sosial, bukan hanya kedisiplinan struktural. Bahkan ketika menyebut pengalaman retreat di Akademi Militer, Bima menekankan aspek relasional: “kami mendapatkan kekeluargaan, ada tim building.” Dengan demikian, militerisasi pendidikan tidak diposisikan sebagai tindakan tidak bermoral, tetapi perlu dilengkapi dimensi psikososial agar tetap selaras dengan prinsip pendidikan anak.

### **Treatment Recommendation**

Dalam aspek treatment recommendation, solusi yang dibingkai media tidak berupa penghentian program pembinaan di barak militer, melainkan penyempurnaan konsep pelaksanaan melalui pendekatan multidisipliner. Rekomendasi utama meliputi pelibatan pakar pendidikan, psikolog, ahli keluarga, serta partisipasi keluarga siswa. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan: “melibatkan juga tentunya para pakar... psikolog... dan

tentu harus diajak bicara juga keluarganya.” Selain itu, solusi juga mencakup integrasi unsur konseling dan pendekatan kekeluargaan: “tempatny bisa saja di barak tetapi di sana hendaknya disusun konsep yang juga melibatkan bimbingan atau konseling.” Framing ini menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan bersifat reformulatif, bukan konfrontatif. Program militer tetap dianggap memungkinkan, tetapi harus disertai desain pendidikan yang lebih holistik, mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan pedagogis. Dengan demikian, media membingkai jalan tengah antara pendekatan disipliner militer dan pendekatan pendidikan humanis.

### 3.1.8. Bupati Karawang akan kirim pelajar SMA/SMK nakal ke markas militer TNI



**Gambar 3.8** Framing berita 8

## **Define Problems**

Dalam pemberitaan tersebut, masalah utama yang dibingkai media adalah rencana pengiriman para pelajar SMA/SMK di Kabupaten Karawang yang nakal ke Markas Militer TNI Yonif 305, sebagaimana kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait pendidikan barak militer. Untuk pelaksanaan program itu, Pemerintah Kabupaten Karawang diminta bersurat kepada Panglima Komando Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) yang selanjutnya langsung dilaksanakan oleh Yonif 305. Hal itu tersirat dalam kutipan langsung, "... Kita masih nunggu izin Pangkostrad, kalau diizinkan, Yonif 305 sudah siap".

Untuk siswa nakal yang dimaksud akan menjalani pendidikan di barak militer diidentifikasi sebagai mereka yang sering bolos sekolah, terlibat tawuran, mengonsumsi minuman beralkohol, dan terlibat jenis kenakalan remaja lainnya. Pendidikan barak militer dinilai sebagai solusi untuk mendisiplinkan mereka, sebagaimana terlihat pada pernyataan "... Terkait pengiriman pelajar nakal ke markas TNI untuk menjalani pendidikan disiplin".

Bahkan, Pemkab Karawang pun menyelaraskan program pendidikan di barak militer untuk kalangan siswa SMA/SMK, dengan mereka yang masih duduk di jenjang SD dan SMP. Meski dengan pola yang berbeda, pendidikan karakter tetap menjadi penekanan dalam pembinaan siswa-siswa SD dan SMP. Secara lebih spesifik, untuk siswa SD dan SMP diberikan penguatan praktik keagamaan yang diharapkan menjadi dasar penguatan karakter bagi anak-anak, terutama saat usia dini.

Secara hukum, Pemkab Karawang pun telah menyiapkan regulasi berupa Surat Instruksi Bupati Karang Nomor 188.342/1077/Kesra/2025 tertanggal 5 Mei 2025 yang berfokus pada penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan dasar. Dalam surat tersebut mencakup pelaksanaan kegiatan kerohanian rutin setiap pagi di sejkagm di antaranya shalat dhuha Bersama, membaca Al Quran, menghafal Asmaul Husna, serta menghafal surat-surat pendek yang telah terangkum dalam Juz Amma.

### **Diagnose Causes**

Framing penyebab masalah dalam berita cenderung diarahkan pada kurangnya disiplin, lemahnya pembinaan karakter, serta pengaruh lingkungan sosial yang negatif terhadap pelajar. Hal ini tampak dari penjelasan bahwa siswa yang akan dikirim ke barak militer adalah mereka yang “terlibat tawuran, mengonsumsi minuman beralkohol, bolos sekolah, hingga aksi kenakalan remaja lainnya”. Penyebab kenakalan tidak dijelaskan secara struktural (misalnya faktor ekonomi atau pendidikan), melainkan lebih difokuskan pada perilaku individu dan lemahnya kontrol sosial.

Selain itu, terdapat asumsi bahwa sistem pendidikan atau keluarga belum optimal dalam membangun karakter siswa, terutama dengan bekal ilmu keagamaan. Hal ini terlihat dari kebijakan Karawang yang menambahkan penguatan pendidikan agama karena dianggap bisa menjadi “... dasar penguatan karakter bagi anak-anak, terutama saat usia dini.” Dengan kata lain, penyebab masalah di dalam berita tersebut diframing sebagai kurangnya pembinaan moral, spiritual, dan kedisiplinan di kalangan anak-anak.

“Kami membuat surat edaran agar anak-anak SD dan SMP diberikan penguatan karakter dengan praktik pendidikan keagamaan, Misalnya sebelum masuk kelas berdoa

menghafal surat pendek, kemudian pas istirahat shalat dhuha berjamaah, ... “ Pernyataan ini juga memperjelas penyebab masalahnya adalah karena lemahnya pembinaan moral, spiritual, dan kedisiplinan di kalangan anak-anak.

### **Make Moral Judgement**

Dalam aspek penilaian moral, sebagian pemberitaan cenderung memberikan legitimasi positif terhadap pendekatan semi-militer sebagai solusi pembinaan karakter untuk siswa jenjang SMA/SMK, serta memberi ruang bagi penyelerasan konsep tersebut dengan penerapan pendidikan karakter yang sudah disusun oleh Pemkab Karawang untuk siswa SD dan SMP bukan dengan pendidikan berbasis semi militer.

Penekanan karakter yang menjadi nilai moral dalam berita ini, ditunjukkan pada pernyataan “Pengayaan pendidikan agama ini diharapkan menjadi dasar penguatan karakter bagi anak, terutama saat usia dini”. Kemudian, Bupati Karawang Asep Syaepuloh juga memastikan bahwa program antara pemerintah provinsi, yakni pendidikan di barak militer sejalan dengan program pemerintah kabupaten dengan pendidikan siswa SD dan SMP, yakni lewat pendidikan berkarakter.

Nilai keagamaan juga ditonjolkan dalam pemberitaan itu, dengan penyebutan dan penjelasan berkali-kali tentang praktik ibadah, seperti sholat berjamaah, membaca dan menghafal Al Quran, serta pelaksanaan kegiatan kerohanian lainnya.

“Jadi, pendidikan berkarakter SD dan SMP di Karawang dilakukan dengan pendekatan sisi keagamaan, Mereka sholat dhuha bersama, serta pelaksanaan kegiatan kerohanian lainnya”. Kutipan ini memperkuat bahwa nilai keagamaan sangat ditekankan dalam upaya membangun karakter peserta didik.



## **Treatment Recommendation**

Rekomendasi solusi yang paling dominan dalam berita adalah pengiriman siswa bermasalah ke barak militer sebagai bentuk pembinaan karakter dan disiplin. Hal ini ditegaskan dalam judul dan lead bahwa “Bupati Karawang Aep Syaepuloh akan mengirim pelajar SMA/SMK nakal ke markas militer TNI”. Istilah siswa “nakal” diperjelas definisinya dalam pernyataan “Para pelajar nakal ini di antaranya yang sering bolos sekolah, terlibat tawuran, mengonsumsi minuman beralkohol, dan jenis kenakalan lainnya”.

Artinya, pendidikan barak militer yang digagas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dipandang sebagai solusi untuk mengatasi kenakalan remaja itu. Dalam hal ini, Pemkab Karawang sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan TNI Yonif 305 untuk pelaksanaan pendidikan barak militer, namun pelaksanaannya masih menunggu izin tertulis dari Pangkostrad.

Sedikit berbeda penanganan untuk siswa SD dan SMP yang bermasalah secara perilaku, Pemkab Karawang menyiapkan pendidikan sisi keagamaan atau pendidikan berbasis keagamaan di sekolah sebagai solusinya. “Untuk pelajar SD dan SMP, pihaknya menerapkan program pendidikan berkarakter dengan pendekatan sisi keagamaan atau berbasis keagamaan, bukan dengan pendidikan semi militer”.

Meski berbeda konsep pendekatannya, Pemkab Cianjur menyampaikan bahwa pendidikan berkarakter berbasis keagamaan untuk siswa SD dan SMP selaras dengan pendidikan barak militer yang digagas oleh Gubernur Dedi Mulyadi, yakni sama-sama bertujuan membentuk karakter yang baik. Apalagi, tidak hanya aspek keagamaan yang

ditekankan, melainkan juga aspek fisik, seperti kegiatan senam anak Indonesia sehat selama 15-30 menit setiap hari Jumat, kegiatan Jumat bersih yang melibatkan siswa dan guru, hingga pengenalan olahraga tradisional.

### 3.1.9. DPR setuju TNI bina siswa asal sesuai kurikulum dan tanpa kekerasan



Gambar 3.9 Framing berita 9

#### Define Problems

Dalam teks tersebut, ANTARA membingkai berita untuk menjawab sejumlah kekhawatiran masyarakat terhadap program pendidikan bagi anak bermasalah ke barak militer, utamanya tindak kekerasan dalam proses pendidikan hingga pelanggaran peraturan. Melalui pernyataan Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dave Laksono, terdapat penegasan bahwa program pendidikan di barak militer tidak

masalah, asalkan dilakukan sesuai dengan kurikulum, serta tidak melanggar aturan, termasuk memastikan tidak ada praktik kekerasan dalam pelaksanaannya.

Sejak awal, berita menegaskan bahwa kebijakan ini tidak masalah untuk diterapkan, namun tetap menekankan pada upaya pencegahan atau preventif untuk mencegah tindakan kekerasan karena program pendidikan di barak berkaitan erat dengan institusi militer. Bahkan, DPR pun menilai TNI memiliki kapasitas untuk mendidik berbagai kalangan tanpa menggunakan pendekatan kekerasan, seperti tampak pada pernyataan, “TNI itu sudah memiliki kemampuan untuk melatih berbagai macam orang. Jadi, tidak selalu dengan kekerasan”.

### **Diagnose Causes**

Dalam framing penyebab masalah, teks cenderung pada menyetujui program pendidikan di barak militer, sepanjang ditujukan untuk kebaikan dan sesuai dengan regulasi. Seperti tercakup pada pernyataan, “Itu kan ada aturannya, selama masih sesuai dengan kurikulum dan menjaga fungsi-fungsi utama pendidikan tanpa tumpang tindih, ya tidak ada masalah,”.

Sebagai lembaga negara, DPR, yang diwakili Komisi I sebagai pemberi pernyataan menyoroti sebuah isu merupakan aktor utama, dan jajaran TNI juga diposisikan sebagai aktor yang selama ini identik dengan sosok yang keras dan disiplin. Mereka diklaim tidak hanya mampu dikirim untuk berperang, tetapi dengan kemampuan yang dimilikinya bisa mendidik dan mengarahkan anak-anak bermasalah melalui pendidikan di barak militer.

Pernyataan ini seperti menjawab kekhawatiran dari berbagai kalangan masyarakat bahwa unsur kekerasan tidak akan lepas dari program barak militer bagi anak-anak nakal.

Karena itu, berita juga ditekankan pada pentingnya pengawasan terhadap program pendidikan di barak militer agar tetap berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.

### **Make Moral Judgement**

Penilaian moral dalam teks cenderung bersifat melengkapi terhadap kebijakan pembinaan siswa di barak militer, terutama jika kebijakan tersebut berpotensi menjadi kebijakan populis. Sebagai jaminan, Komisi I DPR yang bermitra kerja dengan TNI memastikan akan terus memantau program-program yang melibatkan institusi militer, terutama jika menyasar kelompok rentan, seperti pelajar guna memastikan tidak terjadi penyimpangan fungsi dan pelanggaran terhadap hak-hak siswa.

Dengan framing ini, media berupaya menepis anggapan umum bahwa program pendidikan di barak militer identik dengan kekerasan, tetapi lebih mengedepankan kedisiplinan, dengan tetap menonjolkan aspek pengawasan dalam pelaksanaannya. Program ini juga dinilai bisa menjadi proses pendewasaan siswa selama prinsip-prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tetap terjaga. Seperti terlihat pada pernyataan, “Disiplin itu bukan berarti harus langsung dikumpulkan dan digebukin. Disiplin itu bisa dengan cara yang tegas dan tepat”.

### **Treatment Recommendation**

Dalam aspek rekomendasi solusi, teks tidak menolak kebijakan pembinaan karakter, tetapi lebih menekankan perlunya pengawasan untuk memastikan pelaksanaan pendidikan di barak, untuk mencegah terjadinya kasus, terutama kekerasan, seperti terlihat dari pernyataan Dave bahwa pengawasan tetap penting untuk memastikan program ini berjalan sebagaimana mestinya.

Bahkan, Dave pun berani “pasang badan” bahwa komisi yang dipimpinnya akan terus memantau program-program yang melibatkan institusi militer, terutama jika menyangkut kelompok rentan, seperti pelajar. Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki legitimasi kuat untuk mengawal program pendidikan di barak militer sehingga menjadi semacam jaminan kepada masyarakat bahwa program tersebut berjalan dengan semestinya.

### 3.1.10. Komnas PA ingatkan asesmen psikologis anak sebelum ke barak militer



**Gambar 3.10** Framing berita 10

#### Define Problems

Dalam berita ini, ANTARA membingkai persoalan utama bukan semata pada pro–kontra kebijakan pengiriman anak bermasalah ke barak militer, melainkan menekankan sebagai pendekatan pembinaan, dengan tetap menjunjung prinsip perlindungan hak anak.

Framing ini terlihat dari pernyataan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Provinsi Banten Hendry Gunawan yang mengatakan bahwa membawa anak-anak bermasalah ke barak militer sebagai bentuk pembinaan patut dikaji lebih mendalam agar tidak bersifat represif atau seragam.

Dengan demikian, media memposisikan program pembinaan anak bermasalah di barak kenakalan anak sebagai kebijakan yang perlu diawali dengan asesmen yang menempatkan kepentingan terbagi bagi anak sebagai prinsip utama. Komnas PA Banten juga merujuk pada sejumlah regulasi terkait pembinaan anak, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Ditegaskan di awal berita, Komnas PA mengapresiasi kebijakan pengiriman siswa ke barak militer dalam menangani anak-anak bermasalah, namun harus tetap memperhatikan kondisi psikologis anak. Media menyoroti bahwa program ini masih berada dalam tahap wacana dan respons kebijakan publik, bukan sebagai solusi final.

### **Diagnose Causes**

Pada elemen diagnosis, berita membingkai bahwa untuk menerapkan kebijakan pendidikan di barak militer boleh saja, tetapi harus mempertimbangkan setidaknya enam poin, antara lain penguatan peran Lembaga pembinaan, asesmen psikologis yang komprehensif, penggunaan pendekatan berbasis budaya lokal banten, serta pelibatan aktif anak sebagai subjek pembinaan.

Hal ini ditegaskan melalui pernyataan: “Anak-anak yang akan dibina harus terlebih dahulu melalui proses asesmen psikologis yang komprehensif”. Hal ini penting agar

pendekatan pembinaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individual anak. Artinya, hasil asesmen itulah nantinya yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembinaan, sesuai pola yang direkomendasikan dari hasil asesmen. Komnas PA juga mendorong partisipasi keluarga dalam pembinaan melalui edukasi parenting. Sebab, pola asuh keluarga kerap menjadi akar permasalahan.

### **Make Moral Judgement**

Dalam aspek moral judgement, berita menampilkan sikap yang relatif moderat dan reflektif. Kebijakan pengiriman anak ke barak militer tidak langsung dinilai salah, tetapi diposisikan sebagai salah satu alternatif yang perlu dikaji secara hati-hati. Hendry menyatakan dirinya “mengapresiasi perhatian Pemerintah Provinsi Banten dalam menangani anak-anak bermasalah.” Pernyataan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap legitimasi kebijakan daerah, sekaligus menjaga posisi netral secara politik dan moral.

Namun demikian, penilaian moral yang lebih kuat diarahkan pada pentingnya asesmen, mengingat kondisi dan permasalahan yang dihadapi masing-masing anak berbeda dan tidak bisa diselesaikan dengan cara seragam. Diperkuat dengan pernyataan, “Pembinaan terhadap anak harus berlandaskan pendekatan perlindungan anak, sesuai amanat UU, ...”.

### **Treatment Recommendation**

Dalam elemen rekomendasi solusi, framing berita tidak secara eksplisit menolak program pendidikan barak militer, tetapi mengarahkan solusi pada pendekatan yang lebih komprehensif, kolaboratif, dan berbasis analisis penyebab. Hendry juga mendorong

partisipasi keluarga dalam proses pembinaan melalui edukasi parenting, sebab lemahnya pola asuh keluarga kerap menjadi akar permasalahan.

Seperti tertuang pada pernyataan, “Pembinaan juga perlu diberikan kepada orang tua melalui program edukasi parenting, baik melalui Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) maupun Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) milik Dinas Sosial.

Selain itu, Komnas PA Banten menilai perlunya monitoring lanjutan pascapembinaan agar proses rehabilitasi berjalan berkelanjutan, termasuk dukungan terhadap Pendidikan dan keterampilan anak. Inilah *treatment recommendation* yang ada dalam berita ini. Sebagai tindak lanjut, Komnas PA Banten juga berencana melakukan audiensi dengan Gubernur Banten dan mendorong pembentukan forum lintas sektor guna Menyusun sistem pembinaan yang sesuai dengan konteks sosial budaya Banten dan perlindungan anak.



### 3.1.11. Menteri HAM sebut pendidikan di barak bisa diterapkan di seluruh RI



**Gambar 3.11** Framing berita 11

#### **Define Problems**

Dalam pemberitaan ini, masalah utama dibingkai sebagai kebutuhan mencari solusi efektif untuk menangani siswa bermasalah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional. Program pendidikan di barak militer diposisikan sebagai alternatif kebijakan pendidikan karakter yang berpotensi diperluas secara nasional apabila terbukti berhasil. Hal ini terlihat dari pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang menegaskan kemungkinan penerapan luas program tersebut: “Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional ... supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia.”

Melalui framing ini, isu tidak hanya dipresentasikan sebagai persoalan lokal di Jawa Barat, tetapi sebagai potensi model nasional. Dengan demikian, media membingkai masalah bukan semata kenakalan siswa, melainkan kebutuhan sistem pendidikan nasional akan metode pembinaan karakter yang dianggap lebih efektif, khususnya terkait kedisiplinan, mental, dan tanggung jawab generasi muda.

### **Diagnose Causes**

Penyebab masalah dalam berita ini diframing berasal dari lemahnya disiplin, lingkungan sosial yang kurang mendukung, serta rendahnya kualitas karakter sebagian siswa. Pernyataan Dedi Mulyadi memperkuat framing tersebut dengan menggambarkan kondisi siswa bermasalah sebagai akibat kurangnya lingkungan pendidikan yang baik: “Selama ini mereka bolos. Mereka tidak pernah belajar, bangunnya rata-rata jam 10 siang... di rumahnya tidak mendapat lingkungan yang baik, di lingkungan sekolahnya tidak mendapat lingkungan yang baik, mereka menjadi anak jalanan.”

Selain itu, Piga juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional, terutama untuk menghadapi tantangan global dan visi Indonesia Emas 2045. Ia menyatakan: “Kalau karakternya tidak humanis, disiplinnya tidak tinggi, mentalnya tidak bagus, tidak produktif, tidak tanggung jawab, bagaimana kita mau go global?” Framing ini menunjukkan bahwa penyebab masalah tidak hanya dilihat sebagai perilaku individu siswa, tetapi juga sebagai persoalan struktural pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda.

### **Make Moral Judgement**

Dalam aspek penilaian moral, berita cenderung membingkai program pendidikan di barak militer sebagai sesuatu yang sah secara moral dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, selama tidak ada kekerasan fisik. Hal ini ditegaskan oleh Pigai: “Pendidikan siswa bermasalah di barak tidak melanggar HAM selama program tersebut dijalankan tanpa hukuman fisik.” Lebih jauh, Pigai mengaitkan program tersebut dengan hak atas pendidikan yang layak: “Mendapat pendidikan yang layak merupakan hak asasi sebagaimana diatur konstitusi.”

Framing moral lainnya adalah pengaitan program dengan agenda nasional, khususnya visi Indonesia Emas 2045 dan Astacita Presiden Prabowo. Pernyataan ini menempatkan program sebagai bagian dari upaya pembangunan bangsa: “Program ini dapat mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas demi mencapai visi Indonesia Emas 2045.” Dengan demikian, penilaian moral dalam berita cenderung positif terhadap program pendidikan barak, karena diposisikan sebagai sarana pembinaan karakter, peningkatan kualitas manusia, dan tidak bertentangan dengan HAM selama dijalankan secara humanis.

### **Treatment Recommendation**

Solusi yang diframing dalam berita ini adalah kemungkinan pengembangan program pendidikan karakter berbasis barak militer sebagai kebijakan nasional, dengan catatan keberhasilan implementasi di Jawa Barat serta pengawasan ketat terhadap aspek HAM. Rekomendasi ini tampak jelas dalam pernyataan Pigai “Akan menyampaikan

kepada Menteri Pendidikan... untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia.”.

Artinya, pendidikan di barak militer dipandang sebagai upaya untuk menyelamatkan dan menyiapkan masa depan generasi muda, seiring dengan visi Indonesia Emas 2045. Sebagaimana dikutip dari pernyataan langsung Pigai, “Sebab, program ini dapat mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas demi mencapai visi Indonesia Emas 2045”.

Selain itu, solusi juga mencakup pendekatan kolaboratif lintas institusi, seperti keterlibatan Kementerian HAM, sekolah, tenaga medis, psikolog, dan guru agama dalam program tersebut. Dedi Mulyadi menjelaskan: “Mereka mendapatkan pendidikan selama lebih kurang 28 hari dengan turut didampingi oleh dokter, psikolog, dan guru mengaji.” Pengawasan HAM juga menjadi bagian rekomendasi solusi, terlihat dari keterlibatan Kantor Wilayah Kementerian HAM: “Kanwil Kementerian HAM juga ikut mengawasi demi memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi.”.

Dengan framing ini, solusi tidak hanya berupa penerapan program militerisasi pendidikan, tetapi juga penguatan pengawasan HAM, kolaborasi institusi, dan integrasi dengan pendidikan formal.

### 3.1.12. 39 pelajar Purwakarta kembali ke rumah pasca-pendidikan di barak TNI.



**Gambar 3.12** Framing berita 12

#### **Define Problems**

Dalam pemberitaan ini, masalah utama dibingkai sebagai persoalan kenakalan remaja dan kebutuhan pembinaan karakter pelajar yang dinilai bermasalah. Media menampilkan para siswa sebagai kelompok yang sebelumnya memiliki perilaku menyimpang seperti tawuran, membolos sekolah, hingga konsumsi minuman keras. Hal tersebut ditegaskan dalam pernyataan bahwa para pelajar “sebelumnya dikenal nakal karena terlibat tawuran, bolos sekolah, bahkan mengonsumsi minuman keras.” Dengan framing ini, isu pendidikan barak militer tidak ditampilkan sebagai kontroversi kebijakan, melainkan sebagai respons terhadap problem moral dan perilaku remaja. Selain itu, fokus

pemberitaan diarahkan pada keberhasilan program setelah selesai dijalankan, ditandai dengan kepulangan pelajar ke orang tua masing-masing setelah “menjalani pendidikan berkarakter bela negara selama 14 hari.” Pendefinisian masalah semacam ini membuat pendidikan barak terlihat sebagai bagian dari solusi pembinaan karakter, bukan sebagai kebijakan yang diperdebatkan.

### **Diagnose Causes**

Penyebab masalah dalam berita diframing berasal dari perilaku negatif pelajar serta lingkungan sosial yang kurang mendukung pembentukan karakter disiplin. Hal ini tampak dari deskripsi siswa yang terlibat tawuran, bolos, dan konsumsi minuman keras, yang menunjukkan adanya kegagalan proses sosial dan pendidikan sebelumnya. Selain itu, berita menyinggung bahwa perubahan karakter perlu dijaga melalui program lanjutan, misalnya “selama dua pekan ke depan akan ada sesi refresh yang bertujuan memastikan perubahan yang berkelanjutan.” Framing ini mengindikasikan bahwa kenakalan pelajar dipandang sebagai masalah pembinaan karakter jangka panjang, bukan sekadar pelanggaran individual. Penyebabnya dipersepsikan sebagai lemahnya disiplin, kurangnya pengawasan, serta kebutuhan lingkungan pendidikan yang lebih terstruktur.

### **Make Moral Judgement**

Penilaian moral dalam berita cenderung positif terhadap program pendidikan di barak militer. Program tersebut digambarkan sebagai sarana efektif untuk membentuk karakter disiplin dan perubahan perilaku pelajar. Pernyataan pejabat daerah menegaskan bahwa pendidikan tersebut dapat “mengubah mereka menjadi lebih baik karena mereka belajar disiplin, menulis janji pada diri sendiri, lingkungan, dan Tuhan.” Selain itu, narasi

emosional seperti “suasana haru dan bangga dalam acara penutupan pelatihan” memperkuat legitimasi moral program sebagai keberhasilan pembinaan.

Testimoni orang tua juga digunakan untuk memperkuat framing positif, misalnya pernyataan: “Anak saya berubah, lebih tenang, dan sopan.” Dengan memasukkan suara orang tua, media membangun citra bahwa program tidak hanya diterima secara institusional tetapi juga secara sosial dan keluarga. Secara implisit, pendidikan barak diposisikan sebagai metode pembinaan moral yang sah dan efektif.

### **Treatment Recommendation**

Solusi yang ditawarkan dalam framing berita ini adalah keberlanjutan program pendidikan karakter berbasis barak militer serta penguatan pembinaan pascaprogram. Hal ini terlihat dari rencana adanya sesi lanjutan setelah pendidikan selesai: “perjalanan pembinaan belum berakhir... akan ada sesi refresh... agar perubahan ke arah yang lebih baik tidak bersifat sementara.” Selain itu, disebutkan adanya pengawasan dari

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), yang menunjukkan upaya menjaga legitimasi program dalam perspektif perlindungan anak. Framing solusi tidak mengarah pada penghentian atau evaluasi kritis program, melainkan pada penguatan implementasi dan keberlanjutan dampaknya. Dengan demikian, berita membingkai pendidikan barak militer sebagai pendekatan pembinaan karakter yang layak diteruskan, dengan dukungan institusi dan keluarga.

### 3.2. Berita yang Kontra terhadap Kebijakan Militer oleh Gubernur Jawa Barat

#### 3.2.1 Pendidikan barak militer berpotensi langgar prinsip pemenuhan hak anak



**Gambar 3.13** Framing berita 13

#### **Define Problem**

Pada elemen define problem, artikel berita ANTARA membingkai persoalan utama bukan lagi pada kenakalan pelajar atau efektivitas pembinaan disiplin, melainkan pada potensi pelanggaran hak anak dalam pelaksanaan Program Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa yang dikenal sebagai pendidikan barak militer. Pergeseran framing ini menunjukkan perubahan sudut pandang media dari pendekatan keamanan dan kedisiplinan menuju perspektif perlindungan anak. Program yang sebelumnya diposisikan sebagai solusi atas kenakalan siswa kini dikonstruksikan sebagai kebijakan yang berisiko



bertentangan dengan prinsip-prinsip hak anak, terutama terkait kemungkinan diskriminasi, pelabelan negatif, serta dampak psikologis terhadap peserta.

Hal ini terlihat jelas dalam pernyataan Ketua KPAI yang menegaskan bahwa “pendidikan barak militer berpotensi melanggar prinsip pemenuhan hak anak.”

Selain itu, potensi stigma sosial terhadap peserta juga ditekankan melalui pernyataan bahwa program tersebut dapat “menimbulkan stigma negatif seperti label anak nakal atau anak bermasalah terhadap peserta program.” Melalui kutipan tersebut, media membingkai masalah utama sebagai ancaman terhadap hak dan martabat anak, bukan semata persoalan kedisiplinan siswa. Dengan demikian, fokus pemberitaan bergeser pada kemungkinan dampak negatif kebijakan terhadap perlindungan anak serta kesesuaiannya dengan standar normatif hak anak.

### **Diagnose Causes**

Dalam elemen diagnose causes, jurnalis ANTARA mengarahkan penyebab potensi pelanggaran hak anak pada mekanisme pelaksanaan program yang dinilai belum berbasis asesmen profesional serta minim partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan. Penyebab masalah tidak lagi dikaitkan dengan perilaku siswa sebagai individu, melainkan pada prosedur institusional yang dianggap kurang transparan dan tidak memenuhi standar perlindungan anak. Hal ini tercermin dalam temuan KPAI bahwa “peserta program tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional, melainkan hanya rekomendasi guru Bimbingan Konseling (BK).” Kutipan tersebut menunjukkan bahwa seleksi peserta dinilai belum menggunakan pendekatan ilmiah yang memadai.

Selain itu, kurangnya transparansi kepada peserta juga diposisikan sebagai faktor penyebab persoalan, sebagaimana terlihat dalam pernyataan: “6,7 persen siswa menyatakan tidak mengetahui alasan mereka mengikuti program itu.” Fakta ini mengindikasikan adanya keterbatasan komunikasi dan partisipasi anak dalam kebijakan yang menyangkut diri mereka. Framing berita mengarahkan penyebab masalah pada prosedur seleksi yang tidak profesional, kurangnya pelibatan anak, serta pendekatan institusional yang cenderung top-down. Dengan demikian, tanggung jawab atas potensi pelanggaran hak anak ditempatkan pada mekanisme kebijakan dan implementasi program, bukan pada perilaku siswa sebagai individu.

### **Make Moral Judgement**

Pada elemen make moral judgement, artikel berita ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan harus berlandaskan prinsip perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta bahwa praktik yang berpotensi melanggar prinsip tersebut dinilai tidak dapat dibenarkan secara moral maupun hukum. Jurnalis menghadirkan KPAI sebagai otoritas moral dalam isu perlindungan anak, sehingga pernyataan lembaga tersebut berfungsi sebagai standar normatif untuk menilai kebijakan pemerintah. Hal ini terlihat dalam kutipan:

“program pendidikan tersebut harus dijalankan dengan menghormati, melindungi, dan memenuhi prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak anak.” Pernyataan tersebut menegaskan bahwa hak anak harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pendidikan.

Penilaian moral semakin diperkuat melalui pernyataan bahwa “Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang menyangkut anak.” Melalui framing ini, pendekatan pendidikan berbasis barak militer secara implisit dinilai berisiko melanggar keadilan, tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan terbaik anak, serta berpotensi berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis mereka. Dengan demikian, kebijakan yang tidak berbasis pada prinsip hak anak dikonstruksikan sebagai kebijakan yang problematis secara moral dan perlu dikoreksi agar selaras dengan standar perlindungan anak.

### **Treatment Recommendation**

Pada elemen treatment recommendation, pemberitaan ANTARA mengarahkan solusi pada perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program pendidikan barak militer agar selaras dengan prinsip pemenuhan hak anak. Media tidak secara eksplisit mendorong penghentian program, tetapi menekankan pentingnya peninjauan ulang mekanisme pelaksanaan, ketepatan sasaran peserta, serta kesesuaian program dengan standar perlindungan anak. Hal ini tampak dalam pernyataan Wakil Ketua KPAI mengenai “perlunya peninjauan kembali terhadap ketepatan sasaran peserta dalam pelaksanaan program.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan dipandang sebagai langkah penting untuk memastikan program tidak menimbulkan dampak negatif.

Selain itu, rekomendasi moral yang ditekankan adalah menjadikan prinsip hak anak sebagai dasar utama kebijakan pendidikan, sebagaimana terlihat dalam pernyataan: “Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang menyangkut anak.” Dengan demikian, solusi yang dibingkai media mencakup penggunaan asesmen psikologis profesional dalam seleksi peserta, peningkatan partisipasi anak dalam

proses pengambilan keputusan, penghapusan stigma diskriminatif, serta penyesuaian program agar sesuai dengan standar perlindungan hak anak. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran fokus dari penguatan disiplin semata menuju pendekatan yang lebih berbasis hak dan kesejahteraan anak.

### 3.2.2 Komnas HAM soal siswa bermasalah dididik TNI: Perlu ditinjau ulang



**Gambar 3.14** Framing berita 14

#### **Define Problem**

Dalam berita ini, ANTARA membingkai isu utama adalah konsep pendidikan barak militer yang perlu ditinjau ulang karena tidak tepat. Bahwa membawa siswa masuk ke barak militer dalam rangka Pendidikan karier tidak menjadi masalah, yakni agar mereka memahami apa saja sejatinya tugas TNI, Polri, dan institusi lainnya. Namun, apabila siswa diminta untuk mengikuti pendidikan tertentu yang berhubungan dengan kemiliteran

menjadi keliru. Pernyataan Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sugiro, “Sebetulnya bukan kewenangan TNI untuk melakukan civic education (pendidikan kewarganegaraan. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu maksudnya apa”.

Melalui pernyataannya, Atnike memposisikan pendekatan militer sebagai tindakan yang berlebihan, tidak proporsional, dan kurang relevan dalam pendidikan pelajar. Dengan demikian, problem utama yang dikonstruksikan media adalah kontroversi kebijakan disiplin berbasis militer yang dinilai tidak selaras dengan prinsip pendidikan sipil dan memunculkan perdebatan etis dalam kebijakan publik.

### **Diagnose Causes**

Pada elemen diagnose causes, artikel ini tidak menempatkan kenakalan remaja sebagai penyebab utama persoalan, melainkan mengarahkan perhatian pada pendekatan kebijakan pemerintah daerah yang dianggap kurang tepat, bahkan keliru. Atnike menegaskan bahwa keliru jika pendidikan barak militer dilakukan sebagai bentuk hukuman kepada anak-anak yang bermasalah dalam perilakunya. Dalam pernyataan singkatnya, “Oh iya dong (kebijakan keliru, red.). Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur”. Ini menunjukkan bahwa sumber masalah diposisikan pada logika kebijakan itu sendiri, bukan pada perilaku siswa semata. Hal ini mengindikasikan kritik terhadap cara berpikir pembuat kebijakan yang dinilai cenderung menggunakan pendekatan koersif dibandingkan pendekatan pedagogis.

Argumen Dedi sebagai Gubernur Jabar juga dimasukkan sebagai pembanding, bahwa program kebijakan barak militer merupakan pendidikan karakter bagi anak-anak yang bermasalah yang dimulai di daerah-daerah yang dianggap rawan kenakalan remaja

bekerja sama dengan institusi TNI dan Polri. “Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya”. Dedi bersikukuh bahwa pendidikan barak militer itu sesuai untuk membina karakter dan perilaku anak-anak yang nakal.

### **Make Moral Judgement**

Penilaian moral dalam artikel ini cenderung mendelegitimasi penggunaan pendekatan militer dalam pendidikan anak. Pernyataan Atnike: “sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan *civic education*” mengandung penilaian normatif bahwa pendidikan seharusnya bersifat humanis dan berbasis prinsip pedagogi, bukan pendekatan disipliner ala militer. Dengan framing tersebut, keterlibatan militer diposisikan sebagai tindakan yang terlalu keras, kurang sesuai dengan dunia pendidikan, serta berpotensi menimbulkan persoalan etis dalam pengasuhan anak.

Meskipun Dedi Mulyadi tetap diberi ruang menyampaikan klaim positif mengenai tujuan program terhadap kedisiplinan pelajar, kekeliruan konsep pendidikan barak militer tetap ditekankan untuk ditinjau ulang dalam pemilihan judul dan angle berita. Dipertegas dengan kutipan langsung “Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu (pendidikan barak militer) maksudnya apa”.

### **Treatment Recommendation**

Berita ini merekomendasikan untuk meninjau ulang kebijakan pendidikan barak militer yang saat itu masih menjadi wacana meskipun tidak menawarkan model solusi alternatif secara eksplisit. Namun, dapat diartikan bahwa Komnas HAM menilai program pendidikan barak militer tidak sesuai dengan hak-hak anak. Atnike tidak lantas

menekankan untuk menjauhkan institusi militer dengan anak-anak, melainkan mendekatinya dengan cara yang berbeda. Bahkan, siswa atau pelajar bisa diajak untuk mengunjungi institusi TNI dan Polri untuk melihat kedisiplinan dan berbagai nilai baik yang dapat diambil, namun memasukkan siswa ke dalam institusi itu untuk mendapatkan pendidikan semi militer jelas persoalan yang berbeda.

Secara implisit, berita ini merekomendasikan pendekatan pendidikan yang lebih pedagogis, humanis, dan berbasis institusi sipil, seperti sekolah dan keluarga. Dengan demikian, solusi yang dibangun dalam framing berita mencakup penguatan peran pendidikan formal, pendekatan psikologis dalam pembinaan karakter, serta penolakan terhadap penggunaan metode koersif sebagai jalan pintas dalam sistem pendidikan nasional.

### 3.2.3 Menko Muhaimin: Disiplinkan pelajar tak perlu dididik di barak militer



**Gambar 3.15** Framing berita 15

#### **Define Problem**

Dalam berita ini, ANTARA membingkai isu utama bukan sebagai krisis moral remaja sebagaimana dikonstruksikan oleh Dedi Mulyadi, melainkan sebagai kontroversi kebijakan publik terkait metode pendisiplinan pelajar. Fokus pemberitaan bergeser dari persoalan kenakalan remaja menuju perdebatan mengenai legitimasi penggunaan pendekatan militer dalam konteks pendidikan. Masalah tersebut didefinisikan melalui sikap penolakan Menko Muhaimin terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat: “pihaknya tidak mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengirimkan para siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer.” Selain itu, pernyataan singkat: “Enggak perlu sampai segitu.”



Memiliki kekuatan framing yang signifikan karena memposisikan pendekatan militer sebagai tindakan yang berlebihan, tidak proporsional, dan kurang relevan secara pedagogis. Dengan demikian, problem utama yang dikonstruksikan media adalah kontroversi kebijakan disiplin berbasis militer yang dinilai tidak selaras dengan prinsip pendidikan sipil dan memunculkan perdebatan etis dalam kebijakan publik.

### **Diagnose Causes**

Pada elemen diagnose causes, artikel ini tidak menempatkan kenakalan remaja sebagai penyebab utama persoalan, melainkan mengarahkan perhatian pada pendekatan kebijakan pemerintah daerah yang dianggap kurang tepat. Pernyataan Muhaimin: “saya juga tidak mengerti kenapa idenya.” menunjukkan bahwa sumber masalah diposisikan pada logika kebijakan itu sendiri, bukan pada perilaku siswa semata. Hal ini mengindikasikan kritik terhadap cara berpikir pembuat kebijakan yang dinilai cenderung menggunakan pendekatan koersif dibandingkan pendekatan pedagogis.

Walaupun jurnalis tetap menyertakan konteks tentang pelajar yang dikirim ke barak militer—seperti dugaan keterlibatan tawuran, merokok, dan penyalahgunaan narkoba—informasi tersebut lebih berfungsi sebagai latar kebijakan daripada justifikasi terhadap program tersebut. Dengan demikian, penyebab masalah dalam framing berita ini bergeser dari perilaku individu remaja menuju ketepatan pendekatan kebijakan publik dalam menangani persoalan pendidikan.

### **Make Moral Judgement**

Penilaian moral dalam artikel ini cenderung mendelegitimasi penggunaan pendekatan militer dalam pendidikan anak. Pernyataan Muhaimin: “untuk mendidik dan

mendisiplinkan anak tidak perlu sampai melibatkan militer.” mengandung penilaian normatif bahwa pendidikan seharusnya bersifat humanis dan berbasis prinsip pedagogi, bukan pendekatan disipliner ala militer. Dengan framing tersebut, keterlibatan militer diposisikan sebagai tindakan yang terlalu keras, kurang sesuai dengan dunia pendidikan, serta berpotensi menimbulkan persoalan etis dalam pengasuhan anak.

Meskipun Dedi Mulyadi tetap diberi ruang menyampaikan klaim positif mengenai dampak program terhadap kedisiplinan pelajar, narasi tersebut ditempatkan sebagai pandangan yang berseberangan dengan kritik pemerintah pusat. Struktur pemberitaan ini memperlihatkan adanya konflik wacana antara pemerintah daerah yang mendukung pendekatan militer dan pemerintah pusat yang mempertanyakan relevansinya. Namun secara moral, kritik Muhaimin tampil lebih ringkas dan normatif sehingga terkesan lebih rasional dan moderat.

### **Treatment Recommendation**

Walaupun artikel tidak menawarkan model solusi alternatif secara eksplisit, framing pemberitaan mengarah pada gagasan bahwa pembinaan karakter pelajar sebaiknya dilakukan melalui pendekatan non-militer. Pernyataan: “tidak perlu sampai melibatkan militer.” secara implisit merekomendasikan pendekatan pendidikan yang lebih pedagogis, humanis, dan berbasis institusi sipil seperti sekolah dan keluarga. Dengan demikian, solusi yang dibangun dalam framing berita mencakup penguatan peran pendidikan formal, pendekatan psikologis dalam pembinaan karakter, serta penolakan terhadap penggunaan metode koersif sebagai jalan pintas dalam sistem pendidikan nasional.

### 3.2.4 Wajib Militer Demul dinilai berseberangan dengan konsep pedagogi



**Gambar 3.16** Framing berita 16

#### **Define Problem**

Dalam berita ini, ANTARA membingkai isu utama bukan sebagai persoalan kenakalan remaja ataupun efektivitas pendidikan karakter berbasis militer, melainkan sebagai perdebatan pedagogis mengenai kesesuaian pendekatan militer dengan prinsip pendidikan modern. Permasalahan utama dikonstruksikan sebagai ketidaksesuaian kebijakan wajib militer bagi siswa bermasalah dengan konsep pedagogi yang menempatkan kebutuhan, karakter, dan perkembangan individu peserta didik sebagai fokus utama pendidikan.

Framing ini terlihat jelas melalui pernyataan pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan, yang menilai bahwa program tersebut “berseberangan dengan konsep pedagogi yang mengedepankan kebutuhan dan karakter peserta didik.”

Selain itu, ia menegaskan bahwa dalam dunia pendidikan, masalah siswa tidak semestinya langsung dialihkan kepada institusi lain, sebagaimana ia menyatakan, “kalau ada masalah itu tidak harus kemudian diserahkan kepada institusi lain dulu.” Dengan demikian, isu utama yang dibangun media bukan lagi sekadar kebijakan disiplin siswa, tetapi persoalan kesesuaian paradigma pendidikan antara pendekatan pedagogis dan pendekatan militeristik.

### **Diagnose Causes**

Pada elemen diagnose causes, ANTARA membingkai penyebab persoalan bukan pada perilaku siswa semata, melainkan pada cara berpikir kebijakan yang cenderung menyeragamkan masalah anak dan mengandalkan solusi institusional militer. Cecep Darmawan menegaskan bahwa kenakalan siswa tidak dapat dipandang sebagai masalah tunggal yang dapat diselesaikan dengan pendekatan seragam, sebagaimana ia menyatakan, “anak nakal itu kan tidak bisa diseragamkan. Masalahnya kan bisa beda-beda dan TNI bukan obat segala masalah.”

Pernyataan ini mengarahkan pembaca untuk melihat bahwa akar persoalan bukan pada anak, melainkan pada simplifikasi kebijakan pendidikan yang mengabaikan kompleksitas latar belakang psikologis, sosial, dan pendidikan siswa. Selain itu, kritik terhadap pelimpahan tanggung jawab pendidikan kepada institusi militer menunjukkan

adanya asumsi bahwa lembaga pendidikan formal dan keluarga seharusnya tetap menjadi aktor utama pembinaan karakter. Dengan framing seperti ini, penyebab masalah dikonstruksikan sebagai kekeliruan pendekatan kebijakan, bukan semata-mata kenakalan remaja.

### **Make Moral Judgement**

Elemen moral judgement dalam berita ini diarahkan pada penilaian bahwa pendekatan pendidikan berbasis wajib militer kurang sesuai secara pedagogis dan berpotensi menyimpang dari prinsip pendidikan humanistik. Meskipun Cecep mengakui bahwa niat kebijakan tersebut mungkin baik, ia tetap menekankan bahwa pendekatan pendidikan harus mempertimbangkan perkembangan individu siswa. Hal ini tercermin dalam pernyataannya, “Ini niatnya mungkin baik ya, harus kita hargai lah Pak Dedi itu,” namun ia segera mengoreksi arah kebijakan dengan menyarankan konsep alternatif yang lebih pedagogis.

Penilaian moral juga diperkuat melalui gagasan bahwa pendidikan seharusnya tidak semata-mata mengandalkan disiplin militer, tetapi pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek psikologis, spiritual, dan sosial. Dengan framing ini, pendekatan militer tidak secara eksplisit ditolak sebagai sesuatu yang sepenuhnya salah, tetapi dinilai kurang tepat jika dijadikan solusi utama dalam pendidikan anak.

Nilai moral yang dibangun adalah bahwa pendidikan ideal harus berbasis kebutuhan peserta didik, bukan pendekatan koersif (paksaan) atau institusional semata.

## **Treatment Recommendation**

Pada aspek treatment recommendation, ANTARA membingkai solusi bukan pada penghapusan total pendidikan karakter berbasis disiplin, tetapi pada penggeseran konsep dari wajib militer menuju pendidikan pendahuluan bela negara yang lebih sesuai dengan prinsip pedagogi. Cecep menyarankan bahwa program tersebut sebaiknya merujuk pada kerangka hukum yang ada, yaitu pendidikan pendahuluan bela negara sesuai Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, sebagaimana ia menyatakan, “kalau saya konsepnya bukan pendidikan militer seperti Wamil tetapi pendidikan pendahuluan Bela Negara.”

Selain itu, ia menekankan pentingnya perencanaan matang melalui kurikulum, roadmap, serta keterlibatan berbagai pihak seperti pendidik, psikolog, tokoh agama, dan pemerintah. Pernyataannya, “harus terprogram, dibuat roadmapnya grand designnya sampai kapan,” menunjukkan bahwa solusi yang direkomendasikan adalah pendekatan sistematis, pedagogis, dan kolaboratif.

Cecep juga mengusulkan agar program pembentukan karakter semestinya tidak hanya ditujukan bagi siswa bermasalah, tetapi untuk seluruh siswa agar tidak ada stigma terhadap mereka yang menjalani program, seperti pendidikan di barak militer. “Jadi, bukan hanya untuk siswa nakal tapi untuk seluruh siswa,” sehingga stigma terhadap peserta dapat diminimalkan. Dengan framing ini, media mengarahkan solusi pada pendekatan pendidikan karakter yang lebih inklusif, terencana, dan berbasis pedagogi, bukan pendekatan militeristik yang bersifat reaktif.

### 3.2.5 PKPA sebut pembinaan anak secara militer tidak sentuh akar persoalan



**Gambar 3.17** Framing berita 17

#### Define Problem

Dalam berita ini, ANTARA membingkai isu utama bukan semata persoalan kenakalan remaja ataupun efektivitas program pendidikan barak militer, melainkan kritik terhadap pendekatan militeristik dalam pembinaan anak yang dinilai tidak menyentuh akar persoalan sosial. Masalah utama dikonstruksikan sebagai ketidaktepatan pendekatan kebijakan pemerintah daerah dalam menangani anak bermasalah, khususnya ketika solusi yang dipilih adalah pendidikan karakter berbasis disiplin militer.

Framing tersebut tampak jelas melalui pernyataan Direktur Eksekutif PKPA, Keumala Dewi, yang menegaskan bahwa “pendekatan militeristik terhadap anak-anak ...

tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.” Dengan demikian, problem yang dibangun media bukan sekadar perilaku menyimpang anak, melainkan kesalahan pendekatan intervensi sosial yang dianggap terlalu represif dan tidak mempertimbangkan dimensi perlindungan anak. Berita ini menggeser fokus dari “anak nakal” sebagai sumber masalah menuju evaluasi terhadap kebijakan pembinaan itu sendiri.

### **Diagnose Causes**

Pada elemen diagnose causes, ANTARA membingkai penyebab utama persoalan bukan pada individu anak, tetapi pada faktor struktural seperti kegagalan sistem pengasuhan keluarga dan kurangnya intervensi perlindungan anak di tingkat sosial. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan PKPA bahwa akar persoalan terletak pada “kegagalan sistem pengasuhan di tingkat keluarga dan minimnya intervensi berbasis perlindungan anak di tingkat lokal.” Selain itu, berita juga menyoroti bahwa banyak anak bermasalah sebenarnya merupakan korban kondisi sosial yang kompleks, sebagaimana dinyatakan bahwa “banyak dari anak-anak tersebut justru merupakan korban dari pengabaian, kekerasan, atau disfungsi keluarga.” Framing ini mengarahkan pembaca untuk melihat kenakalan anak sebagai gejala dari persoalan sosial yang lebih luas, bukan sekadar kesalahan individu. Dengan demikian, penyebab masalah dikonstruksikan sebagai kegagalan ekosistem sosial—keluarga, komunitas, dan sistem perlindungan anak—yang belum optimal dalam memberikan dukungan bagi perkembangan anak.

### **Make Moral Judgement**

Elemen moral judgement dalam berita ini mengarah pada kritik normatif terhadap pendekatan pembinaan militer yang dinilai kurang sesuai dengan prinsip perlindungan



anak. PKPA menegaskan bahwa rehabilitasi anak seharusnya dimulai dari lingkungan keluarga dan dukungan sosial, bukan melalui sistem pembinaan keras yang terpisah dari konteks kehidupan anak. Hal ini terlihat dari pernyataan, “rehabilitasi pertama seharusnya dimulai dari rumah dan dukungan sistem keluarga,” serta penegasan bahwa “yang harus dibenahi adalah lingkungan dan sistem pendukungnya, bukan semata-mata anaknya yang dibawa ke dalam sistem pembinaan keras dan tertutup.” Pernyataan ini membangun penilaian moral bahwa pendekatan militeristik berpotensi mengabaikan hak anak atas pengasuhan yang suportif dan lingkungan sosial yang sehat.

Meskipun demikian, ANTARA tetap menampilkan klaim positif dari Gubernur Jawa Barat yang menyebut program tersebut “memberikan dampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar.” Kehadiran dua perspektif ini menunjukkan adanya konflik moral antara pendekatan disipliner negara dan pendekatan perlindungan anak, namun kritik PKPA tampil sebagai argumen normatif yang lebih berfokus pada kepentingan terbaik anak.

### **Treatment Recommendation**

Dalam aspek treatment recommendation, framing solusi dalam berita ini diarahkan pada penguatan sistem pengasuhan keluarga dan intervensi perlindungan anak berbasis komunitas, bukan pada perluasan pendidikan militer. PKPA menekankan bahwa solusi utama terletak pada pembenahan lingkungan sosial anak, sebagaimana dinyatakan bahwa “yang harus dibenahi adalah lingkungan dan sistem pendukungnya.” Selain itu, rekomendasi implisitnya adalah memperkuat pendekatan rehabilitatif

yang melibatkan keluarga, komunitas, dan sistem perlindungan anak lokal. Berbeda dengan narasi pemerintah daerah yang mendorong perluasan program barak militer hingga jenjang pendidikan lebih tinggi, berita ini justru menyoroti pentingnya pendekatan preventif, psikososial, dan berbasis perlindungan anak. Dengan framing tersebut, solusi yang dikonstruksikan media menekankan pendidikan yang humanistik, penguatan keluarga, serta intervensi sosial yang lebih komprehensif daripada pendekatan disipliner militer semata.

### 3.2.6 Gubernur Lemhannas sebut pendidikan militer bukan untuk anak-anak



**Gambar 3.18** Framing berita 18

## **Define Problems**

Dalam berita ini, masalah utama dibingkai bukanlah kenakalan siswa itu sendiri, melainkan anggapan bahwa baraka tau yang diasosiasikan sebagai institusi militer dapat dijadikan tempat pembinaan bagi anak-anak yang dianggap bermasalah. Secara tegas, berita ini menyiratkan penolakan atas program pendidikan di barak militer bagi siswa atau remaja yang nakal yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi. Sebab, barak militer bukan untuk anak-anak yang nakal, melainkan tempat untuk orang-orang yang terpilih dan terbaik. Artinya, jangan sampai kemudian terstigma bahwa anak-anak yang bermasalah atau nakal akan dimasukkan ke barak militer. Seperti tercakup dalam pernyataan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, “Jangan sampai terstigma bahwa kalau orang nakal dimasukkan ke barak militer” yang menjadi titik utama yang digunakan untuk mendefinisikan persoalan.

Lemhannas diketahui merupakan lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategis ketahanan nasional dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang menunjukkan betapa urgensinya lembaga ini dalam menyiapkan masa depan bangsa. Sebagai pimpinan lembaga pemerintah, Ace menyoroti aspek kewibawaan pada konsep pendidikan di barak militer. Sebab, pendidikan militer harus dijaga sebagai pendidikan yang diarahkan untuk aspek akademis, emosional, serta kepemimpinan, selain untuk membentuk kedisiplinan dan patriotisme. Semua hal tersebut harus dibentuk berdasarkan proses yang sesuai dengan tumbuh kembang anak.

Kalau untuk pembinaan anak-anak yang bermasalah secara perilaku tidak pada tempatnya jika dimasukkan ke barak militer, namun sebaiknya justru ditangani institusi

yang lebih tepat untuk memperbaiki perilaku anak, seperti lembaga pendidikan, kemudian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dan sebagainya.

Dengan framing ini, media menempatkan persoalan pada potensi ketidaktepatan identifikasi masalah siswa, sehingga kebijakan dinilai perlu evaluasi. Fokus pemberitaan tidak diarahkan pada keberhasilan atau kegagalan program yang diusulkan oleh Dedi Mulyadi, melainkan pada bagaimana masyarakat memaknai fungsi pendidikan militer dan posisi anak bermasalah dalam sistem pembinaan nasional.

### **Diagnose Causes**

Dalam aspek penyebab masalah, teks membingkai bahwa persoalan muncul dari ketidakutuhan atau terlalu sederhana dalam menyelesaikan persoalan kenakalan remaja, yakni dengan memasukkannya ke dalam barak militer. Hal ini tercemin dari pernyataan Gubernur Lemhannas bahwa upaya pembinaan anak-anak yang bermasalah secara perilaku harus dilihat secara utuh. “Tidak boleh misalnya setiap ada orang atau anak-anak yang bermasalah dimasukkan ke militer”.

Menurut Ace, perilaku menyimpang anak tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan sosial, keluarga, pola asuh, dan kondisi pendidikan. “Perilaku seorang anak pasti dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan sosial, lingkungan keluarga, maupun lingkungan hak asuh yang diberikan oleh orang tuanya”. . Dengan menonjolkan faktor-faktor tersebut, ANTARA membangun pemahaman bahwa akar persoalan berada pada lingkungan perkembangan anak yang kompleks, bukan semata-mata karena kurangnya disiplin yang dapat diselesaikan melalui pendidikan militer.

Framing ini menunjukkan bahwa kenakalan remaja merupakan persoalan multidimensional yang membutuhkan pendekatan sosial, psikologis, dan pendidikan secara menyeluruh.

Selain itu, berita juga menyinggung bahwa program pendidikan barak militer untuk anak bermasalah yang digagas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi merupakan implementasi kebijakan daerah yang relatif baru, dan juga baru akan dikaji oleh pemerintah, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, “Jadi, sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil. Tapi, pemerintah akan memeriksa akan jadi ini. Kebijakan-kebijakan yang baru, kebijakan-kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di pemerintah”.

### **Make Moral Judgement**

Pada aspek penilaian moral, berita ini menegaskan bahwa pendidikan militer memiliki fungsi yang lebih luhur daripada sekadar menjadi tempat pembinaan anak bermasalah. Lemhannas adalah lembaga yang diposisikan sebagai otoritas pemerintah nonkementerian yang selama ini menangani pendidikan kepemimpinan dalam mempertahankan ketahanan nasional, baik dari kalangan TNI, Polri, maupun pejabat, seperti anggota DPR dan DPD sehingga kompeten untuk menyoroti kebijakan pendidikan di barak militer.

Ace menilai bahwa pendidikan militer harus dijaga kewibawaannya sebagai sarana pembentukan kepemimpinan, patriotisme, kedisiplinan, dan pengembangan aspek akademik maupun emosional seseorang. Melalui penekanan tersebut, media membingkai bahwa mengidentikkan militer dengan tempat pembinaan anak nakal merupakan

pandangan yang kurang tepat. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menentukan kebijakan pendidikan yang menyasar anak dan menjaga wibawa pendidikan militer. Secara tegas, disampaikan bahwa pendidikan militer bukan untuk anak-anak nakal, melainkan justru orang-orang yang terpilih dan terbaik.

Selain itu, terdapat pesan moral bahwa penanganan anak harus memperhatikan hak-hak mereka serta mempertimbangkan proses tumbuh kembang yang sesuai dengan kebutuhan psikologis dan sosial anak. Dengan kata lain, anak yang mengalami masalah perilaku tidak seharusnya langsung dipandang sebagai objek yang membutuhkan pendekatan keras atau militeristik.

Untuk membina anak-anak yang bermasalah secara perilaku, bukan ranah militer karena dikhawatirkan akan memengaruhi kewibawaan lembaga militer. Artinya, jangan sampai terstigma bahwa pendidikan militer ditujukan untuk membina anak-anak yang bermasalah secara perilaku, sebab sudah ada lembaga yang lebih tepat untuk menanganinya, terutama lembaga pendidikan.

### **Treatment Recommendation**

Dalam elemen rekomendasi solusi, berita membingkai perlunya pengkajian yang berbasis perspektif yang komprehensif dan holistik terkait program pendidikan di barak militer bagi anak-anak yang bermasalah. Hal ini terlihat dari penegasan Gubernur Lemhannas sebagai lembaga yang selama ini berperan dalam menjaga ketahanan nasional, bahwa perilaku seorang anak pasti dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan sosial, lingkungan keluarga, maupun lingkungan hak asuh yang diberikan oleh orang tuanya.

Solusi yang ditawarkan dalam berita ini adalah perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan holistik dalam menangani anak-anak bermasalah. Ace menyarankan agar pemerintah tidak serta-merta menjadikan barak militer sebagai solusi utama. Rekomendasi ini menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan adalah pelibatan lembaga-lembaga yang lebih berkompeten dalam melakukan pembinaan perilaku anak, seperti lembaga pendidikan, DP3A yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, serta melibatkan lembaga seperti KPAI, dan sebagainya, serta lembaga pendidikan tentunya.

### 3.2.7 KPAI soroti belum ada SOP penyelenggaraan pendidikan barak militer



**Gambar 3.19** Framing berita 19

### **Define Problems**

Dalam berita ini, masalah utama dibingkai sebagai ketiadaan standar operasional yang jelas dalam penyelenggaraan program pendidikan karakter berbasis barak militer di Jawa Barat. Media tidak mempersoalkan langsung keberadaan program tersebut sebagai ide kebijakan, tetapi menyoroti aspek teknis dan regulatif yang dianggap belum matang. Hal ini ditegaskan melalui pernyataan KPAI bahwa “belum terdapat standar baku yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan program, seperti belum ada panduan, petunjuk teknis, dan Standar Operasional Prosedur (SOP).” Dengan framing seperti ini, isu utama diarahkan pada persoalan tata kelola kebijakan, bukan semata pada konsep pendidikan militer itu sendiri.

Pendefinisian masalah ini juga diperkuat dengan penjelasan mengenai variasi pelaksanaan di lapangan. Disebutkan bahwa tidak adanya standar baku menyebabkan “perbedaan pola pelaksanaan di dua lokasi pelaksanaan Program Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa.” Dengan demikian, media membingkai persoalan sebagai potensi inkonsistensi implementasi kebijakan yang dapat berdampak pada efektivitas program pendidikan karakter bagi siswa.

### **Diagnose Causes**

Dalam elemen diagnosis penyebab, berita membingkai bahwa akar persoalan berasal dari belum tersedianya regulasi teknis yang jelas dan sistematis dalam pelaksanaan program pendidikan barak militer. Tidak adanya SOP, panduan, dan petunjuk teknis diposisikan sebagai faktor utama yang memunculkan perbedaan praktik di lapangan. Hal ini terlihat dari penegasan bahwa ketiadaan standar tersebut mengakibatkan variasi dalam



“struktur program, ketersediaan sarana prasarana, rasio antara peserta dan pembina, serta metode pengajaran mata pelajaran sekolah yang tidak seragam.”

Dengan framing tersebut, penyebab masalah tidak diarahkan pada siswa atau konsep pendidikan karakter secara umum, melainkan pada kesiapan institusi dan perencanaan kebijakan. Media menempatkan kebijakan sebagai sesuatu yang masih dalam tahap penyesuaian dan membutuhkan penguatan regulasi agar implementasinya tidak menimbulkan ketimpangan kualitas. Penekanan ini secara implisit menunjukkan bahwa keberhasilan program pendidikan sangat bergantung pada perencanaan teknis dan kesiapan sistem pendukungnya.

### **Make Moral Judgement**

Penilaian moral dalam berita ini bersifat hati-hati dan evaluatif. KPAI diposisikan sebagai lembaga yang memiliki otoritas moral dalam isu perlindungan anak, sehingga kritik yang disampaikan diarahkan pada pentingnya memastikan kualitas pendidikan dan perlindungan peserta didik. Kekhawatiran moral terlihat dari pernyataan bahwa kondisi tanpa standar baku “dikhawatirkan dapat memengaruhi mutu hasil dari program secara keseluruhan.” Hal ini menunjukkan bahwa aspek kualitas pendidikan dan kesejahteraan anak menjadi pertimbangan etis utama.

Namun, berita juga menghadirkan keseimbangan framing dengan menyebut bahwa “dari sisi struktur program pendidikan karakter dinilainya cukup baik.” Pernyataan ini menempatkan program tidak sepenuhnya negatif secara moral, melainkan masih memiliki nilai positif seperti pendidikan bela negara, penguatan mental, spiritual, sosial, serta pembentukan kedisiplinan. Dengan demikian, framing moral berita cenderung moderat:

program dinilai potensial, tetapi harus dijalankan dengan standar yang jelas agar tidak merugikan anak.

### **Treatment Recommendation**

Dalam elemen rekomendasi solusi, berita membingkai perlunya penguatan regulasi, standar operasional, dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pendidikan barak militer. Hal ini terlihat dari penjelasan mengenai tujuan kunjungan KPAI, yaitu untuk “mendapatkan informasi yang akurat tentang realisasi pelaksanaan program, memastikan adanya mitigasi terhadap risiko pelanggaran prinsip dasar perlindungan anak, menilai regulasi yang tepat dan memadai, ketersediaan SDM dan anggaran yang cukup juga berkelanjutan.”

Rekomendasi ini menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan bukan penghentian program, melainkan perbaikan tata kelola melalui standar operasional yang jelas, ketersediaan sumber daya, serta sistem perlindungan anak yang komprehensif. Selain itu, media juga membingkai pentingnya memastikan bahwa “ekosistem perlindungan anak bekerja secara optimal.” Framing ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan berbasis militer harus disertai mekanisme perlindungan anak, pengawasan, serta koordinasi lintas institusi agar program berjalan efektif dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi peserta didik.

### 3.2.8 Gubernur Jateng pilih ikuti aturan hukum ketimbang siswa di barak TNI



**Gambar 3.20** Framing berita 20

#### Define Problems

Dalam pemberitaan ini, masalah utama dibingkai sebagai perdebatan mengenai cara mendisiplinkan siswa bermasalah, khususnya antara pendekatan hukum formal dengan pendekatan pendidikan karakter ala militer di barak TNI. Media menampilkan posisi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang menegaskan pentingnya mengikuti aturan hukum yang sudah ada dibanding menciptakan metode baru yang belum tentu sesuai regulasi. Hal ini terlihat dari kutipan: "Sudah ada aturan hukumnya kenapa harus ngarang-ngarang? Kami sih enggak usah, sesuai dengan ketentuan saja."

Kutipan tersebut menunjukkan framing bahwa persoalan disiplin siswa bukan kekurangan metode, melainkan konsistensi dalam menjalankan aturan hukum yang sudah berlaku. Selain itu, berita juga mengontraskan kebijakan Jawa Tengah dengan rencana Jawa Barat yang ingin mendidik siswa bermasalah di barak militer. Kontras ini memperjelas framing konflik kebijakan antar daerah dalam menangani kenakalan remaja.

### **Diagnose Causes**

Penyebab masalah dalam framing berita ini diarahkan pada perilaku siswa yang melakukan pelanggaran hukum serta perbedaan cara pandang pemerintah daerah dalam menanganinya. Ahmad Luthfi menekankan bahwa jika siswa sudah cukup umur dan melakukan tindak pidana, maka penyebab utamanya adalah tindakan kriminal itu sendiri, sehingga perlu penanganan hukum. Hal ini tampak dalam kutipan: "Kalau anak-anak sudah di atas umur, melakukan tindak pidananya, sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya."

Selain itu, penyebab lain secara implisit adalah munculnya gagasan pendidikan militer bagi siswa bermasalah yang dianggap sebagai inovasi kebijakan oleh sebagian pihak, namun oleh Luthfi diposisikan sebagai sesuatu yang tidak perlu karena regulasi hukum sudah ada.

Sementara itu, rencana Gubernur Jawa Barat juga dipresentasikan sebagai respons terhadap wilayah yang dianggap rawan, sebagaimana kutipan: "Kami mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap." Dari framing ini terlihat bahwa penyebab masalah diposisikan pada dua hal: Kenakalan atau pelanggaran hukum oleh siswa. Perbedaan strategi pemerintah daerah dalam merespons fenomena tersebut.

### **Make Moral Judgement**

Dalam aspek penilaian moral, berita cenderung membingkai pendekatan hukum sebagai lebih rasional, sah, dan sesuai aturan, sementara pendekatan barak militer diposisikan sebagai alternatif yang belum tentu diperlukan. Ahmad Luthfi menyampaikan penilaian moral melalui pernyataan: "Sudah ada aturan hukumnya kenapa harus ngarang-ngarang?" Kata "ngarang-ngarang" mengandung evaluasi normatif bahwa membuat program baru tanpa dasar hukum jelas dapat dipandang kurang tepat. Selain itu, ia juga menekankan fungsi hukum sebagai efek jera: "Kalau sudah cukup umur... ya dilakukan pidana biar efek jera."

Pernyataan ini menegaskan framing bahwa hukuman pidana dipandang sebagai mekanisme pembelajaran sosial yang sah dan efektif. Di sisi lain, untuk anak di bawah umur, penilaian moral diarahkan pada pentingnya pendidikan keluarga dan sekolah: "Kalau di bawah umur... kembalikan orang tuanya." Hal ini menunjukkan nilai moral bahwa pembinaan anak seharusnya tetap berada dalam ranah pendidikan dan keluarga, bukan militerisasi.

### **Treatment Recommendation**

Solusi yang diframing dalam berita ini adalah penegakan hukum sesuai regulasi yang berlaku serta penguatan peran keluarga dan sekolah dalam pembinaan siswa. Ahmad Luthfi merekomendasikan pendekatan berbeda berdasarkan usia: Untuk siswa cukup umur yang melakukan tindak pidana proses hukum. "Kalau anak-anak sudah di atas umur... sidik tuntas terkait tindak pidananya." Untuk siswa di bawah umur → pembinaan melalui sekolah dan keluarga. "Masih ada namanya guru, kembalikan orang tuanya."

Dengan framing ini, solusi militerisasi pendidikan tidak diposisikan sebagai kebutuhan mendesak. Sebaliknya, kepatuhan pada sistem hukum dan institusi pendidikan formal dipromosikan sebagai jalan yang lebih legitim. Sementara rencana Jawa Barat dimunculkan sebagai alternatif kebijakan, misalnya: "Menyekolahkan siswa bermasalah... dididik di barak militer."

**Tabel 3.1** Tabel Analisis 4 Elemen Framing Entman

| No | Judul Berita                                                      | Define Problems                                     | Diagnose Causes                                   | Make Moral Judgement                                     | Treatment Recommendation                               |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | Siswa bermasalah Jabar akan dididik di barak militer              | Kenakalan pelajar menjadi masalah serius            | Kurangnya disiplin, pergaulan bebas, kriminalitas | Pendidikan karakter dianggap penting                     | Pembinaan di barak TNI selama 6 bulan                  |
| 2  | Pemerintah kaji program pembinaan siswa ke barak militer          | Program masih berupa inovasi yang perlu diuji       | Belum diketahui efektivitasnya                    | Program boleh diterapkan jika tidak melanggar hak anak   | Pemerintah akan mengkaji efektivitas program           |
| 3  | Mendukbang a respons soal anak nakal dikirim ke barak             | Kenakalan anak merupakan gejala sosial              | Ada penyebab yang melatarbelakangi perilaku anak  | Tidak cukup hanya menghukum, akar masalah harus dicari   | Pendekatan kolaboratif dan mengurai penyebab kenakalan |
| 4  | Dedi Mulyadi akan diskusi dengan Mendikdasmen                     | Sekolah dan keluarga dinilai gagal menangani remaja | Game online, media sosial, narkoba, lingkungan    | Pendidikan disiplin dianggap solusi terbaik              | Kolaborasi TNI, dokter, psikolog, guru agama           |
| 5  | Pigai: Pendidikan siswa bermasalah di barak tak salah standar HAM | Muncul perdebatan soal HAM                          | Anggapan bahwa pembinaan dianggap hukuman         | Program dinilai tidak melanggar HAM bila tanpa kekerasan | Pembinaan karakter tanpa corporal punishment           |

|    |                                                                       |                                                          |                                                    |                                                        |                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 6  | Disdikpora Cianjur: Pembinaan di barak dapat menekan siswa bermasalah | Tawuran dan kenakalan pelajar meningkat                  | Kurangnya kedisiplinan siswa                       | Pembinaan militer dinilai efektif                      | Mengirim siswa bermasalah ke barak sebagai langkah terakhir |
| 7  | Wamendagri nilai anak bermasalah masuk ke barak perlu libatkan pakar  | Konsep program perlu dimatangkan                         | Pendekatan psikologis belum kuat                   | Pendidikan anak harus mempertimbangkan aspek psikologi | Melibatkan psikolog, pakar keluarga, konselor               |
| 8  | Bupati Karawang akan kirim pelajar nakal ke markas militer            | Kenakalan pelajar perlu ditangani                        | Kurangnya karakter dan kedisiplinan                | Program provinsi dianggap positif                      | Pendidikan militer untuk SMA, pendidikan agama untuk SD-SMP |
| 9  | DPR setuju TNI bina siswa                                             | Tidak ada masalah jika sesuai aturan                     | Kekhawatiran terhadap kekerasan                    | Disiplin tidak identik dengan kekerasan                | Program boleh berjalan sesuai kurikulum dan diawasi         |
| 10 | Komnas PA ingatkan asesmen psikologis                                 | Program berpotensi mengabaikan kebutuhan individual anak | Tidak adanya asesmen psikologis                    | Hak anak harus menjadi prioritas                       | Asesmen psikologis, parenting, monitoring pasca program     |
| 11 | Menteri HAM sebut pendidikan di barak bisa diterapkan nasional        | Program dinilai potensial                                | Berhasil meningkatkan disiplin                     | Selaras dengan HAM dan Indonesia Emas                  | Dapat direplikasi secara nasional bila sukses               |
| 12 | 39 Pelajar Purwakarta kembali ke rumah                                | Program dinilai berhasil                                 | Pembinaan disiplin menghasilkan perubahan perilaku | Program memberi dampak positif                         | Pendampingan lanjutan setelah keluar dari barak             |
| 13 | Pendidikan barak berpotensi langgar hak anak                          | Ada potensi pelanggaran hak anak                         | Label 'anak nakal', tanpa asesmen profesional      | Hak anak harus dihormati                               | Peninjauan kembali mekanisme peserta program                |

|    |                                                      |                                                |                                           |                                                            |                                                         |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 14 | Komnas HAM: Perlu ditinjau ulang                     | Pelibatan TNI dipersoalkan                     | Bukan tugas utama TNI mendidik siswa      | Pendidikan militer sebagai hukuman dianggap keliru         | Meninjau ulang kebijakan dan memperjelas dasar hukumnya |
| 15 | Menko Muhaimin: Tidak perlu dididik di barak         | Militer bukan solusi pendidikan                | Cara mendidik tidak harus militer         | Pendidikan sebaiknya dilakukan secara sipil                | Menggunakan pendekatan pendidikan biasa                 |
| 16 | Wajib Militer Demul berseberangan dengan pedagogi    | Konsep dinilai tidak sesuai teori pendidikan   | Anak memiliki masalah yang berbeda-beda   | Pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan peserta didik | Pendidikan bela negara dengan kurikulum komprehensif    |
| 17 | PKPA: Pembinaan militer tidak sentuh akar persoalan  | Kebijakan dinilai salah sasaran                | Disfungsi keluarga menjadi penyebab utama | Anak lebih membutuhkan perlindungan                        | Memperkuat keluarga dan sistem pengasuhan               |
| 18 | Lemhannas: Pendidikan militer bukan untuk anak nakal | Terjadi stigma terhadap pendidikan militer     | Anak dipengaruhi lingkungan               | Pendidikan militer harus dijaga marwahnya                  | Gunakan lembaga pendidikan dan perlindungan anak        |
| 19 | KPAI soroti belum ada SOP                            | Program belum memiliki standar nasional        | Tidak adanya SOP                          | Berpotensi menimbulkan ketimpangan kualitas                | Menyusun SOP, pedoman teknis, standar program           |
| 20 | Gubernur Jateng pilih aturan hukum                   | Penanganan siswa bermasalah harus sesuai hukum | Sudah ada mekanisme hukum                 | Tidak perlu membuat kebijakan baru                         | Gunakan jalur hukum dan pembinaan sekolah               |

### 3.3. Sintesis Hasil Analisis Framing Pemberitaan ANTARA terhadap Kebijakan Pendidikan Barak Militer

Berdasarkan hasil analisis terhadap 20 berita ANTARA mengenai kebijakan pendidikan barak militer bagi siswa bermasalah menggunakan model framing Robert N. Entman, yang



meliputi *Define Problems, Diagnose Causes, Make Moral Judgement, dan Treatment Recommendation*, diperoleh pola konstruksi realitas yang menunjukkan bahwa ANTARA tidak membangun satu framing yang bersifat tunggal. Pemberitaan ANTARA memperlihatkan adanya dua kecenderungan framing utama, yaitu framing yang mendukung kebijakan pendidikan barak militer dan framing yang mengkritisi kebijakan tersebut.

Sintesis dilakukan melalui proses analisis induktif. Setiap berita terlebih dahulu dianalisis menggunakan empat perangkat framing Robert N. Entman. Selanjutnya, dilakukan perbandingan hasil analisis antarberita (*cross-case analysis*) untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam pendefinisian masalah, penentuan penyebab, penilaian moral, serta rekomendasi penyelesaian. Hasil perbandingan tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan pola framing yang memiliki karakteristik serupa sehingga diperoleh framing dominan sebagai temuan penelitian.

Dengan demikian, kategori framing dalam penelitian ini bukan merupakan kategori yang telah ditentukan sebelum penelitian dilakukan, melainkan merupakan hasil sintesis terhadap pola-pola framing yang muncul secara konsisten dalam keseluruhan berita ANTARA.

**Tabel 3.2** Tabel Koding Hasil Analisis Berita

| No | Judul Berita                                                          | Framing yang Muncul                                                                                                | Posisi | Aktor yang Berperan           | Moral yang Terkandung                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Siswa bermasalah Jabar akan dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025 | Peningkatan jumlah siswa bermasalah di Jabar dinilai membutuhkan penanganan khusus, yakni pendidikan barak militer | Pro    | Dedi Mulyadi (Gubernur Jabar) | Pendidikan barak militer merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menyelamatkan generasi muda dari perilaku yang menyimpang |

|   |                                                                        |                                                                                                                               |     |                                                        |                                                                                                           |
|---|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Pemerintah kaji program pembinaan siswa ke barak militer               | Program pembinaan barak militer sepanjang tidak melanggar aturan dan hak anak maka dapat dipertimbangkan                      | Pro | Hasan Nasbi (Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan)    | Program pendidikan di barak militer dapat menjadi solusi selama tidak melanggar aturan hukum dan hak anak |
| 3 | Mendukbangga respons soal anak nakal dikirim ke barak militer          | Kenakalan anak dipandang sebagai masalah yang memiliki akar penyebab kompleks                                                 | Pro | Wihaji (Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga) | Anak perlu dipahami penyebab perilakunya sebelum dibina                                                   |
| 4 | Dedi Mulyadi akan diskusi dengan Mendikdasmen soal Pendidikan di barak | Meningkatnya kenakalan dan penurunan disiplin remaja telah melampaui kapasitas sekolah dan keluarga dalam melakukan pembinaan | Pro | Dedi Mulyadi                                           | Pendidikan berbasis disiplin militer merupakan bentuk penyelamatan generasi muda                          |
| 5 | Pigai: Pendidikan siswa bermasalah di barak tak salah standar HAM      | Pendidikan di barak diposisikan sebagai program yang sah dan tidak melanggar HAM selama tanpa kekerasan fisik                 | Pro | Natalius Pigai (Menteri HAM)                           | Disiplin dapat dibangun tanpa melanggar hak asasi                                                         |
| 6 | Disdikpora Cianjur: Pembinaan di barak dapat menekan siswa bermasalah  | Barak militer dibingkai sebagai solusi efektif untuk menekan kenakalan pelajar                                                | Pro | Ruhli Solehudin (Kepala Disdikpora Kabupaten Cianjur)  | Disiplin dan ketegasan diperlukan dalam pembinaan remaja                                                  |
| 7 | Wamendagri nilai anak bermasalah                                       | Program militer dapat diterapkan tetapi harus                                                                                 | Pro | Bima Arya Sugiarto                                     | Pendidikan anak harus mempertimbangkan                                                                    |

|    |                                                                        |                                                                                                                                  |        |                                                        |                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | masuk ke barak perlu libatkan pakar                                    | melibatkan ahli dan keluarga                                                                                                     |        | (Wakil Mendagri)                                       | n aspek psikologis dan sosial                                                                |
| 8  | Bupati Karawang akan kirim pelajar SMA/SMK nakal ke markas militer TNI | Kenakalan pelajar diposisikan sebagai krisis karakter yang memerlukan disiplin militer                                           | Pro    | Aep Syaepuloh (Bupati Karawang)                        | Karakter dan kedisiplinan penting untuk masa depan generasi muda                             |
| 9  | DPR setuju TNI bina siswa asal sesuai kurikulum dan tanpa kekerasan    | Kebijakan Pendidikan barak militer dapat menjadi bagian dari pendidikan karakter dan kedisiplinan yang dibutuhkan generasi muda. | Pro    | Dave Laksono (Wakil Ketua Komisi I DPR)                | Kebijakan pembinaan pelajar di barak militer boleh asal sesuai kurikulum dan tanpa kekerasan |
| 10 | Komnas PA ingatkan asesmen psikologis anak sebelum ke barak militer    | Kebijakan barak militer perlu diawali dengan asesmen yang menempatkan kepentingan anak sebagai prinsip utama.                    | Pro    | Hendry Gunawan (Ketua Komnas Perlindungan Anak Banten) | Anak perlu menjalani asesmen psikologis sebelum dikirim ke barak militer untuk dibina        |
| 11 | Menteri HAM sebut pendidikan di barak bisa diterapkan di seluruh RI    | Program barak diposisikan sebagai model pendidikan karakter nasional                                                             | Pro    | Natalius Pigai                                         | Pendidikan karakter dipandang sebagai investasi masa depan bangsa                            |
| 12 | 39 pelajar Purwakarta kembali ke rumah pasca-pendidikan di barak TNI   | Program pendidikan barak dibingkai sebagai keberhasilan perubahan perilaku siswa                                                 | Pro    | Saepul Bahri Binzein (Bupati Purwakarta)               | Disiplin dapat membentuk perubahan perilaku positif                                          |
| 13 | Pendidikan barak militer berpotensi langgar prinsip                    | Program diposisikan sebagai kebijakan yang                                                                                       | Kontra | Ai Maryati Solihah (Ketua KPAI)                        | Hak anak harus menjadi prioritas utama                                                       |

|    |                                                                        |                                                                            |        |                                                         |                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    | pemenuhan hak anak                                                     | berpotensi melanggar hak anak                                              |        |                                                         |                                                                                 |
| 14 | Komnas HAM soal siswa bermasalah dididik TNI: Perlu ditinjau ulang     | Pendidikan barak militer adalah tidak sejalan dengan hak anak              | Kontra | Atnike Nova Sigiroy (Ketua Komnas HAM)                  | Pendidikan harus memenuhi hak anak dan dilakukan sesuai aturan                  |
| 15 | Menko Muhaimin: Disiplinkan pelajar tak perlu dididik di barak militer | Pendekatan militer dipandang berlebihan dalam pendidikan                   | Kontra | Abdul Muhaimin Iskandar (Menko Pemberdayaan Masyarakat) | Pendidikan harus humanis dan proporsional                                       |
| 16 | Wajib Militer Demul dinilai berseberangan dengan konsep pedagogi       | Pendidikan militer diposisikan bertentangan dengan prinsip pedagogi modern | Kontra | Cecep Darmawan (Pengamat pendidikan)                    | Pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan peserta didik                      |
| 17 | PKPA sebut pembinaan anak secara militer tidak sentuh akar persoalan   | Militerisasi dipandang tidak menyelesaikan akar masalah sosial anak        | Kontra | Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)               | Anak memerlukan dukungan keluarga dan lingkungan                                |
| 18 | Gubernur Lemhannas sebut pendidikan militer bukan untuk anak nakal     | Program barak militer bukan untuk siswa bermasalah secara perilaku         | Kontra | Ace Hasan Syadzily (Gubernur Lemhannas)                 | Kebijakan pembinaan barak militer perlu dikaji secara komprehensif dan holistic |
| 19 | KPAI soroti belum ada SOP penyelenggara pendidikan barak militer       | Fokus diarahkan pada lemahnya tata kelola dan standar pelaksanaan          | Kontra | Jasra Putra, Ai Maryati Solihah (KPAI)                  | Program pendidikan memerlukan standar dan perlindungan yang jelas               |
| 20 | Gubernur Jateng pilih ikuti aturan hukum ketimbang                     | Penanganan siswa bermasalah diposisikan lebih tepat                        | Kontra | Ahmad Luthfi (Gubernur Jateng)                          | Keluarga, sekolah, dan hukum lebih utama daripada pendekatan militer.           |

|  |                    |                                     |  |  |  |
|--|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|
|  | siswa di barak TNI | melalui hukum dan pendidikan formal |  |  |  |
|--|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|

### 3.3.1 Sintesis Framing Dominan

Hasil sintesis menunjukkan bahwa terdapat lima framing dominan yang dibangun ANTARA terhadap kebijakan pendidikan barak militer bagi siswa bermasalah.

**Tabel 3.3.** Tabel Framing Dominan

| No | Framing Dominan                                                             | Jumlah Berita | Nomor Berita                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1  | Pendidikan barak militer membentuk karakter dan kedisiplinan siswa          | 9             | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 |
| 2  | Pendidikan barak militer merehabilitasi perilaku dan moral siswa bermasalah | 5             | 4, 6, 7, 8, 12              |
| 3  | Pendidikan barak militer mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas     | 3             | 5, 9, 11                    |
| 4  | Pendidikan barak militer berpotensi melanggar prinsip perlindungan hak anak | 4             | 10, 13, 14, 19              |
| 5  | Pendidikan barak militer tidak menyentuh akar persoalan kenakalan remaja    | 7             | 3, 7, 15, 16, 17, 18, 20    |

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa framing yang mendukung kebijakan lebih banyak muncul dalam pemberitaan ANTARA dibandingkan framing yang mengkritisi kebijakan. Namun

demikian, ANTARA tetap memberikan ruang kepada berbagai aktor yang memiliki pandangan berbeda sehingga pemberitaan memperlihatkan adanya kontestasi perspektif terhadap kebijakan pendidikan barak militer.

### **3.3.2 Sintesis Aktor**

Hasil analisis menunjukkan bahwa aktor yang ditonjolkan memiliki keterkaitan dengan arah framing yang dibangun.

Pada kelompok framing yang mendukung kebijakan, aktor yang paling dominan adalah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai penggagas kebijakan, diikuti oleh Menteri Hak Asasi Manusia, DPR RI, pemerintah daerah, sebagian pejabat pemerintah pusat, serta TNI. Aktor-aktor tersebut secara konsisten membangun narasi bahwa pendidikan barak militer merupakan alternatif pembentukan karakter, peningkatan kedisiplinan, rehabilitasi perilaku, dan pembangunan kualitas generasi muda.

Sebaliknya, pada kelompok framing yang mengkritisi kebijakan, aktor yang dominan berasal dari Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas Perlindungan Anak, Yayasan PKPA, akademisi, Gubernur Jawa Tengah, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Lemhannas. Aktor-aktor tersebut menonjolkan pentingnya perlindungan hak anak, pendekatan pedagogis, asesmen psikologis, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), serta penyelesaian akar persoalan kenakalan remaja melalui keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemilihan aktor dalam pemberitaan ANTARA berkontribusi terhadap terbentuknya dua konstruksi realitas yang berbeda mengenai kebijakan pendidikan barak militer.

### **3.3.3 Sintesis Nilai Moral**

Analisis juga menunjukkan adanya perbedaan nilai moral yang dibangun dalam masing-masing framing. Pada framing yang mendukung kebijakan, nilai moral yang paling dominan adalah pentingnya pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, rehabilitasi perilaku, nasionalisme, dan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sebaliknya, framing yang mengkritisi kebijakan lebih menekankan nilai moral berupa penghormatan terhadap hak anak, kepentingan terbaik bagi anak, prinsip non-diskriminasi, pendekatan pedagogis, perlindungan psikologis, serta pentingnya penyelesaian akar persoalan kenakalan remaja melalui pendekatan yang komprehensif.

Perbedaan nilai moral tersebut menunjukkan bahwa setiap framing tidak hanya mendefinisikan masalah secara berbeda, tetapi juga menggunakan landasan moral yang berbeda dalam memberikan legitimasi terhadap kebijakan pendidikan barak militer.

### **3.3.4 Ringkasan Sintesis**

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa ANTARA membangun konstruksi realitas mengenai kebijakan pendidikan barak militer melalui dua kelompok framing utama. Kelompok pertama memosisikan pendidikan barak militer sebagai solusi pembentukan karakter, rehabilitasi perilaku, dan investasi pembangunan generasi bangsa. Kelompok kedua

memosisikan kebijakan tersebut sebagai kebijakan yang perlu dievaluasi karena berpotensi mengabaikan prinsip perlindungan hak anak dan belum menyentuh akar persoalan kenakalan remaja.

Hasil sintesis ini menunjukkan bahwa pemberitaan ANTARA tidak mengonstruksi realitas secara sepihak, melainkan menghadirkan ruang bagi berbagai aktor dengan perspektif yang berbeda. Temuan ini selanjutnya menjadi dasar pembahasan mengenai konstruksi framing ANTARA terhadap kebijakan pendidikan barak militer pada Bab IV.



**Tabel 3.4** Tabel Model Sintesis



